



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
(RPKD)
KOTA DENPASAR**

**BAPPEDA KOTA DENPASAR
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

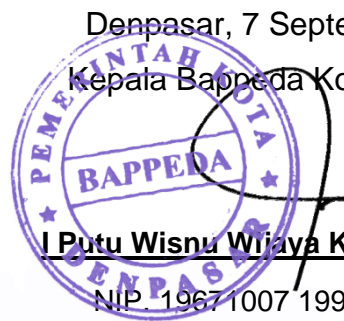
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-NYA. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Denpasar dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Denpasar adalah untuk menyediakan acuan kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam sinergi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RPKD ini diharapkan dapat memberi gambaran kondisi umum tentang kemiskinan di Kota Denpasar, menggali formula untuk dapat menanggulangi kemiskinan di Kota Denpasar sehingga menjadi referensi bagi Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan program/kegiatan.

Kami mengharapkan sumbang saran dan masukan dari berbagai pihak, para pemangku kepentingan guna melengkapi dan menyempurnakan naskah RPKD Kota Denpasar ini. Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan semua pihak yang turut berkontribusi sehingga Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Denpasar ini berhasil dirampungkan.

Denpasar, 7 September 2020

Kepala Bappeda Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wriaya Kusuma, ST.MT

NIP. 196710071997031004

Daftar Isi

Isi	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Grafik.....	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Bagan	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPKD.....	3
1.3 Acuan Kebijakan	3
1.4 Sistematika RPKD.....	4
BAB II	
KONDISI UMUM KOTA DENPASAR	6
2.1 Aspek Geografis.....	9
2.2 Aspek Demografi.....	7
2.3. Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Pemerintah Daerah	18
BAB III	
PROFIL KEMISKINAN KOTA DENPASAR	45
3.1 Kemiskinan Mikro dan Makro.....	45
3.2 Garis Kemiskinan.....	49
3.3 Hubungan Dimensi Pendidikan dan Kemiskinan	52
3.4 Hubungan Dimensi Ketenagakerjaan dan Kemiskinan	57
3.5 Hubungan Dimensi Kesehatan dan Kemiskinan	60
3.6 Hubungan Dimensi Infrastruktur dan Fasilitas Perumahan Terhadap Kemiskinan	62
3.7 Hubungan Dimensi Belanja Daerah dan Kemiskinan.....	68

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM72

4.1 Arah Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan.....72

4.2 Paradigma Baru Penanggulangan Kemiskinan.....78

4.3 Isu-Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan.....80

4.4 Sasaran dan Fokus Penanggulangan Kemiskinan81

4.5 Strategi Penanggulangan Kemiskinan82

4.6 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.....82

4.7 Prioritas Program Berdasarkan Kluster.....88

4.8 Pembagian Peran Pelaku Pembangunan Daerah Dalam Penanggulangan
Kemiskinan93

4.9 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dan Partisipatif.....94

4.10 Kepedulian Dunia Usaha dan Program Bina Lingkungan96

4.11 Penanganan Covid-19 di Kota Denpasar.....96

4.12 Target Penanggulangan Penduduk Miskin100

BAB V

LOKASI PRIORITAS102

5.1 Dimensi Pertumbuhan Ekonomi.....102

5.2 Dimensi Tingkat Pendidikan104

5.3 Dimensi Ketenaga Kerjaan106

5.4 Dimensi Kesehatan Masyarakat.....107

5.5 Dimensi Infrastruktur dan Fasilitas Perumahan107

5.6 Dimensi Belanja Daerah108

BAB IV

PENUTUP109

Daftar Grafik

Grafik 2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2014 - 2019	10
Grafik 2.2 Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2019....	12
Grafik 2.3 Piramida Penduduk Kota Denpasar Tahun 2019.....	12
Grafik 2.4 Persentase Penduduk Menurut Pendidikan yang Dltamatkan di Kota Denpasar Tahun 2018	15
Grafik 2.5 Persentase Jumlah Pekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha di Kota Denpasar Tahun 2018	16
Grafik 2.6 Pertumbuhan Jumlah PDRB Kota Denpasar 2014-2019 Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010.....	17
Grafik 2.7 Perkembangan Jumlah PDRB ADHK Kota Denpasar Tahun 2014-2019 Berdasarkan ADHK Tahun Dasar 2010 Dibandingkan Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Bali	18
Grafik 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2014-2019	19
Grafik 2.9 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB Kota Denpasar Tahun 2014 – 2018	22
Grafik 2.10 Laju Inflasi Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2014 – 2019	24
Grafik 2.11 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Bulan Januari sampai dengan Agustus Tahun 2020	25
Grafik 2.12 Perkembangan PDRB per Kapita Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2014–2019....	26
Grafik 2.13 Perkembangan Indeks Gini Kota Denpasar Dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014–2018.....	27
Grafik 2.14 Perkembangan Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2014-2019.....	29
Grafik 2.15 Perkembangan Presentase Jumlah Penduduk Miskin di Kota DenpasarDibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014–2019	30
Grafik 2.16 Perkembangan IPM Kota Denpasar dibandingkan IPM Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014-2019.....	32
Grafik 2.17 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota DenpasarDibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014-2019	33
Grafik 2.18 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014-2019	35

Grafik 2.19 Perkembangan Prevalensi Stunting Kota Denpasar Tahun 2014–2019.....37

Grafik 2.20 Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Usia 15 Tahun ke Atas di Kota
Denpasar Tahun 2014-2019.....38

Grafik 2.21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan
Nasional Tahun 2014–201940

Grafik 2.22 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi
Bali dan Nasional Tahun 2014–201942

Grafik 2.23 Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi
Bali dan Nasional Tahun 2014–201943

Grafik 3.1 Angka Harapan Hidup Kota Denpasar61

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Letak Geografis Kecamatan di Kota Denpasar	6
Tabel 2.2 Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan	8
Tabel 2.3 Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasarkan Ketinggian Dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya	9
Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2014 - 2019.....	10
Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2014 - 2019	11
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kota Denpasar Tahun 2014 - 2019	13
Tabel 2.7 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun 2014 – 2019	14
Tabel 2.8 Pekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha di Kota Denpasar Tahun 2014 - 2018	15
Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014-2019 Atas Dasar Harga Berlaku 2010 di Kota Denpasar	21
Tabel 2.10 Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2014-2019.....	24
Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Kota Denpasar Tahun 2014-2019	26
Tabel 2.12 Indeks Gini Kota Denpasar Tahun 2014-2018.....	27
Tabel 2.13 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Denpasar 2014-2019	28
Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Denpasar 2014-2019.....	32
Tabel 2.15 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Denpasar 2014-2019	33
Tabel 2.16 Angka Harapan Hidup Kota Denpasar 2014-2019.....	34
Tabel 2.17 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Denpasar 2014-2019	35
Tabel 2.18 Persentase Balita Gizi Kurang di Kota Denpasar 2014-2019	36
Tabel 2.19 Prebalensi Stunting di Kota Denpasar 2014-2019	37
Tabel 2.20 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Denpasar 2014-2019.....	38
Tabel 2.21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Denpasar 2014 – 2019.....	39
Tabel 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2014 – 2019.....	41
Tabel 2.23 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Denpasar Tahun 2014 – 2019.....	42

Tabel 2.24 Rasio Kesempatan Kerja Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Denpasar 2014-2019.....44

Tabel 3.1 Rekapitulasi Kemiskinan di Desa/Kelurahan Kota Denpasar Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2019.....46

Tabel 3.2 Perbandingan Kemiskinan Makro dan Kemiskinan Mikro.....48

Tabel 3.4 Indeks KedalamanKemiskinandanIndeksKeparahan Kemiskinan di Kota Denpasar, 2015–2019.....50

Tabel 3.5 Indikator Kemiskinan Provinsi Bali 2019.....51

Tabel 3.6 Angka Partisipasi Murni Kota Denpasar.....54

Tabel 3.7 Angka Partisipasi Kasar Kota Denpasar.....55

Tabel 3.8 Tingkat pendidikan bagi penduduk miskin di Kota Denpasar.....56

Tabel 3.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Denpasar.....58

Tabel 3.10 Tingkat Pengangguran Terbukan (TPT) Kota Denpasar.....58

Tabel 3.11 Status Pekerjaan Penduduk Kota Denpasar.....59

Tabel 3.12 Persebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Denpasar Tahun 2019.....61

Tabel 3.13 Potensi Sumber Daya Air di Kota Denpasar.....63

Tabel 3.14 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Kota Denpasar Tahun 2014-2019.....64

Tabel 3.15 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Denpasar Tahun 2014-2019.....65

Tabel 3.16 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Denpasar Tahun 2014-2019.....67

Tabel 3.17 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Kota Denpasar Tahun 2014-2019.....67

Tabel 3.18 Program Perangkat Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan.....68

Tabel 4.1 Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan.....88

Tabel 4.2 Bantuan Penanggulangan Dampak Covid-19 dengan Pendanaan dari APBD.....98

Tabel 5.1 Jenis Persoalan dan Wilayah Intervensi per Dimensi.....100

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Denpasar 7

Daftar Bagan

Bagan 4.1 Paradigma Baru Penanggulangan Kemiskinan 79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang harus ditangani secara intensif dan berkesinambungan dengan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, dan merupakan bagian yang tidak henti-hentinya diperangi dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan dipicu oleh berbagai faktor seperti distribusi pendapatan yang tidak merata, terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, pelayanan umum dan lingkungan yang mengakibatkan keterbatasan pada akses terhadap barang dan jasa, yang akhirnya berkembang kepada isi kondisi geografis, kondisi lingkungan dan kesetaraan gender.

Masalah kemiskinan merupakan tantangan pembangunan di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia, dan bersifat multidimensi. Masyarakat miskin secara umum ditandai oleh ketidakberdayaan/ ketidakmampuan (*powerlessness*) dalam hal : (1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan; (2) melakukan kegiatan usaha produktif; (3) menjangkau akses sumberdaya sosial dan ekonomi; (4) menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sifat apatis dan fatalistik; dan (5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah. Upaya mengatasi kemiskinan telah dilakukan dengan menyediakan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan pembangunan pertanian.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya yang tersedia. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan

secara bertahap, terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar.

Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara dan pengemban amanat rakyat berperan aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Berbagai kebijakan program yang telah ditempuh menunjukkan hasil yang kurang optimal. Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Kebijakan dan upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun kemasyarakatan lainnya masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga kelembagaan masyarakat dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat miskin.

Wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh Negara, termasuk Indonesia, memberikan dampak yang sangat besar terhadap tingkat kemiskinan di berbagai daerah. Di Kota Denpasar, wabah Covid-19 menyebabkan roda perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik. Bidang pariwisata yang selama ini menjadi pegangan utama perekonomian Kota Denpasar mengalami kemacetan, hal tersebut memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Data Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, mencatat terdapat 3.028 tenaga kerja (naker) kehilangan pekerjaan. Terinci dari total itu, sebanyak 2.975 naker dirumahkan tanpa upah, dan 53 orang di PHK. Data tersebut tercatat sampai awal April 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, Pemerintah Kota Denpasar pada tahun anggaran 2020 menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2021-2026. RPKD ini nantinya diharapkan bisa mengimplementasikan dan mensinergikan seluruh program penanggulangan kemiskinan baik di Dinas/Instansi Pemerintah maupun swasta di Kota Denpasar. Sehingga dengan begitu program penanggulangan kemiskinan tidak tumpang tindih dengan Dinas/Instansi terkait. Dengan demikian program penanggulangan kemiskinan bisa dilaksanakan secara bersinergi dan terpadu dengan Perangkat Daerah terkait.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPKD

Maksud penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Denpasar adalah untuk menyediakan acuan kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam sinergi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan tujuan penyusunan RPKD ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan kondisi umum tentang kemiskinan di Kota Denpasar.
2. Menyediakan opsi prioritas program untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Denpasar sehingga menjadi referensi bagi Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan.
3. Menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Denpasar sebagai bagian dari gerakan penanggulangan kemiskinan nasional dan global.
4. Mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan pihak yang peduli.
5. Memberikan arah bersama bagi pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan.

1.3 Acuan Kebijakan

Acuan kebijakan yang menjadi dasar hukum dari penyusunan RPKD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025

1.4 Sistematika RPKD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, sistematika RPKD setidaknya berisikan Pendahuluan; Kondisi Umum Daerah; Profil Kemiskinan Daerah; Prioritas Program; dan Lokasi Prioritas. Sebagai sebuah rencana strategis yang menjadi acuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sistematika RPKD ini disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, acuan kebijakan penyusunan RPKD.

Bab II. Kondisi Umum Kota Denpasar

Menguraikan tentang aspek geografis, aspek demografi, dan aspek serta indikator kinerja sesuai bidang urusan penyelenggaraan tingkat sasaran Pemerintah Daerah.

Bab III. Profil Kemiskinan Kota Denpasar

Menguraikan kondisi kemiskinan di Kota Denpasar dilihat dari garis kemiskinan serta hubungan dimensi pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, infrastruktur, dan belanja daerah kaitannya dengan kemiskinan.

Bab IV. Prioritas Program

Menguraikan tentang arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, paradigma baru penanggulangan kemiskinan, peran perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan, hingga penanganan kemiskinan di tengah pandemic Covid-19.

Bab V. Lokasi Prioritas

Menguraikan tentang permasalahan penanggulangan kemiskinan yang berkembang di Kota Denpasar, yang dikelompokkan berdasarkan 6 dimensi antara lain dimensi pertumbuhan ekonomi, dimensi pendidikan, dimensi ketenagakerjaan, dimensi kesehatan, dimensi infrastruktur serta dimensi belanja daerah.

Bab VI. Penutup

BAB II

KONDISI UMUM KOTA DENPASAR

Kondisi umum Kota Denpasar dalam bab ini, menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Denpasar.

2.1. ASPEK GEOGRAFIS

A. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kota Denpasar dibentuk pada tanggal 15 Januari 1992 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar. Adapun letak geografis Kota Denpasar di antara 08°35'31" sampai 08°44'49" Lintang Selatan dan 115°10'23" sampai 115°16'27" Bujur Timur. Kota Denpasar merupakan Ibukota Provinsi Bali yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dengan letak geografis sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Letak Geografis Kecamatan di Kota Denpasar

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1.	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja	080035'31"-080044'49"	1150012'09"-1150014'39"
2.	Denpasar Barat	Kelurahan Padangsembian	080036'24"-080041'59"	1150010'23"-1150014'14"
3.	Denpasar Timur	Kelurahan Kesiman	080035'31"-080040'36"	1150012'29"-1150016'27"
4.	Denpasar Selatan	Kelurahan Sesetan	080040'00"-080044'49"	1150011'23"-1150015'54"

Sumber: BPS Kota Denpasar Tahun 2020

Kota Denpasar memiliki peran sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian sehingga menjadi titik pusat kegiatan dan penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

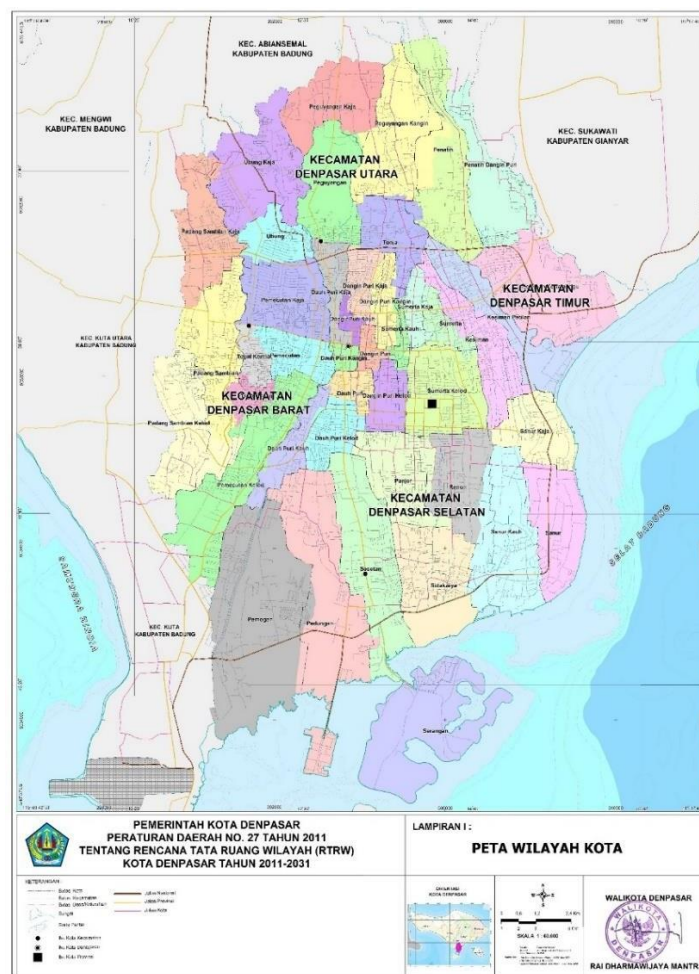
Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten

Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung

Selatan: Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa

Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)

Berdasarkan administrasinya, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Barat, dan Denpasar Timur memiliki 11 desa/kelurahan, sedangkan Kecamatan Denpasar Selatan memiliki 10 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas 4.999 ha atau 49,99 km² (sekitar 39,12% dari total luas wilayah Kota Denpasar), sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Denpasar Timur dengan luas 2.231 ha atau 22,31 km² (sekitar 17,46% dari total luas wilayah Kota Denpasar).



Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Denpasar
Sumber: Lampiran RTRW Kota Denpasar Tahun 2011 – 2031

Tabel 2.2.

Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan Desa/Kelurahan		Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Kecamatan Denpasar Utara		3.142	24,59
	1.1	Kelurahan Dangin Puri Kaja	142	4,52
	1.2	Desa Dangin Puri Kangin	75	2,39
	1.3	Kelurahan Tonja	230	7,32
	1.4	Desa Dangin Puri Kauh	72	2,29
	1.5	Desa Pemecutan Kaja	385	12,25
	1.6	Desa Ubung	103	3,28
	1.7	Desa Ubung Kaja	430	13,69
	1.8	Desa Dauh Puri Kaja	109	3,47
	1.9	Kelurahan Peguyangan	644	20,50
	1.10	Desa Peguyangan Kaja	536	17,06
	1.11	Desa Peguyangan Kangin	416	13,24
2.	Kecamatan Denpasar Barat		2.406	18,83
	2.1	Desa Padang Sambian Klod	412	17,12
	2.2	Desa Pemecutan Klod	442	18,37
No.	Kecamatan Desa/Kelurahan		Luas (ha)	Persentase (%)
	2.3	Desa Kauh Puri Kauh	183	7,61
	2.4	Desa Kauh Puri Klod	188	7,81
	2.5	Kelurahan Dauh Puri	60	2,49
	2.6	Desa Dauh Puri Kangin	59	2,45
	2.7	Kelurahan Pemecutan	186	7,73
	2.8	Desa Tegal Harum	62	2,58
	2.9	Desa Tegal Kertha	35	1,45
	2.10	Kelurahan Padang Sambian	370	15,38
	2.11	Desa Padang Sambian Kaja	409	17,00
3.	Kecamatan Denpasar Timur		2.231	17,46
	3.1	Desa Dangin Puri Klod	209	9,37
	3.2	Desa Sumerta Klod	268	12,01
	3.3	Kelurahan Kesiman	239	10,71
	3.4	Desa Kesiman Petilan	281	12,60
	3.5	Desa Kesiman Kertalangu	380	17,03
	3.6	Kelurahan Sumerta	50	2,24
	3.7	Desa Sumerta Kaja	52	2,33
	3.8	Desa Sumerta Kauh	87	3,90
	3.9	Kelurahan Dangin Puri	62	2,78
	3.10	Kelurahan Penatih	291	13,04
	3.11	Desa Penatih Dangin Puri	312	13,98
4.	Kecamatan Denpasar Selatan		4.999	39,12
	4.1	Desa Pemogan	971	19,42
	4.2	Kelurahan Pedungan	749	14,98
	4.3	Kelurahan Sesetan	739	14,78
	4.4	Kelurahan Serangan	481	9,62
	4.5	Desa Sidakarya	389	7,78
	4.6	Kelurahan Panjer	359	7,18
	4.7	Kelurahan Renon	254	5,08
	4.8	Desa Sanur Kauh	386	7,72
	4.9	Kelurahan Sanur	402	8,04
	4.10	Desa Sanur Kaja	269	5,38
Kota Denpasar			12.778	100

Sumber: BPS Kota Denpasar Tahun 2019

B. Topografi Wilayah

Letak Kota Denpasar yang berada di tengah-tengah Pulau Bali dan berbatasan dengan Selat Lombok berdampak pada adanya kawasan pesisir dan memiliki bentang lahan yang relatif datar. Sebesar 59,1% dari wilayah Kota Denpasar terletak pada ketinggian antara 0–25 mdpl, dan sisanya mencapai ketinggian 75 mdpl. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2%) berupa dataran dengan kemiringan lereng yang secara umum berkisar 0–2% (datar) ke arah selatan, sebagian lain memiliki kemiringan lereng antara 2–8% (landai). Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2–15% (landai).

Tabel 2.3.
Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar
Berdasar Ketinggian Dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya

Klasifikasi Ketinggian (meter)	Luas Wilayah	
	km ²	(%)
00–12	49,99	39,12
00–75	22,31	17,46
	24,06	18,83
	31,42	24,59
Jumlah	127,78	100

Sumber: BPS Kota Denpasar Tahun 2020

Variasi wilayah dengan kelerengan dan ketinggian seperti yang ada di Kota Denpasar memberikan dampak positif bagi Kota Denpasar, yaitu sebagai faktor pendukung kegiatan ekonomi serta pariwisata yang menjadi sektor utama perkembangan Kota Denpasar. Kondisi ini relatif aman dari bencana kegunungapian, serta memiliki ancaman dari bahaya erosi yang relatif kecil karena wilayahnya relatif datar dan jauh dari wilayah pegunungan

2.2. ASPEK DEMOGRAFI

2.2.1. Struktur Penduduk

A. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumberdaya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila

disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2019 sebanyak 947.100 jiwa, meliputi empat kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 305.400 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar tahun 2010-2019 dengan menggunakan metode eksponensial yaitu sebesar 1,78%. Berikut ini perkembangan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan:

Tabel 2.4.

Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2014-2019

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)						Pertumbuhan Penduduk 2010-2019 (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Denpasar Selatan	273.090	279.640	286.060	292.670	299.050	305.400	2,15
Denpasar Timur	148.890	151.200	153.480	155.760	157.890	160.200	1,41
Denpasar Barat	250.440	255.160	259.790	264.490	269.030	273.600	1,70
Denpasar Utara	191.180	194.600	197.970	201.380	204.630	207.900	1,62
Kota Denpasar	863.600	880.600	897.300	914.300	930.600	947.100	1,78

Sumber: BPS Kota Denpasar; Hasil Olahan, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk di Kota Denpasar selalu meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, laju pertumbuhan setiap tahunnya mengalami penurunan. Data tahun 2014 sampai dengan 2019, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan yang semakin menurun.



Grafik 2.1

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2014-2019

Sumber: Hasil olahan, 2020

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi kebutuhan dasar penduduk. Jumlah dan pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Faktor jumlah dan pertumbuhan penduduk tersebut memberikan karakter kependudukan suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk yang minus dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kematian tinggi ataupun perpindahan ke luar tinggi. Sementara itu, pertumbuhan penduduk meningkat dapat diartikan jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar.

B. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

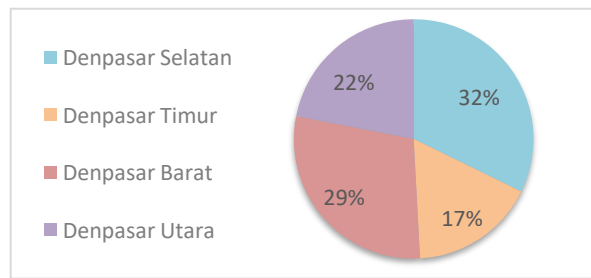
Luas seluruh Kota Denpasar yaitu 127,78 km², dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 947.100 jiwa (hasil perhitungan BPS), maka kepadatan penduduk Kota Denpasar yaitu sebesar 7.412 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk terpadat tahun 2019 adalah Kecamatan Denpasar Barat sebesar 12.265 jiwa/km². Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah tahun 2019 yaitu di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 6.109 jiwa/km². Kepadatan penduduk per kecamatan disajikan selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.5.
Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2014-2019

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Denpasar Selatan	49,99	5.463	5.594	5.722	5.855	5.982	6.109
2	Denpasar Timur	22,31	6.674	6.777	6.879	6.982	7.077	6.562
3	Denpasar Barat	24,06	10.409	10.605	10.798	10.993	11.181	12.265
4	Denpasar Utara	31,42	6.085	6.194	6.301	6.409	6.512	6.618
Kota Denpasar		127,78	6.759	6.891	7.022	7.155	7.283	7.412

Sumber: BPS Kota Denpasar

Distribusi atau persebaran penduduk menurut kecamatan di Kota Denpasar pada tahun 2019 termasuk kurang merata. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 305.400 jiwa (32,25% dari penduduk Kota Denpasar), sedangkan di Kecamatan Denpasar Timur jumlah penduduknya sebesar 160.200 jiwa (16,91% dari penduduk Kota Denpasar).



Grafik 2.2.

Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2019

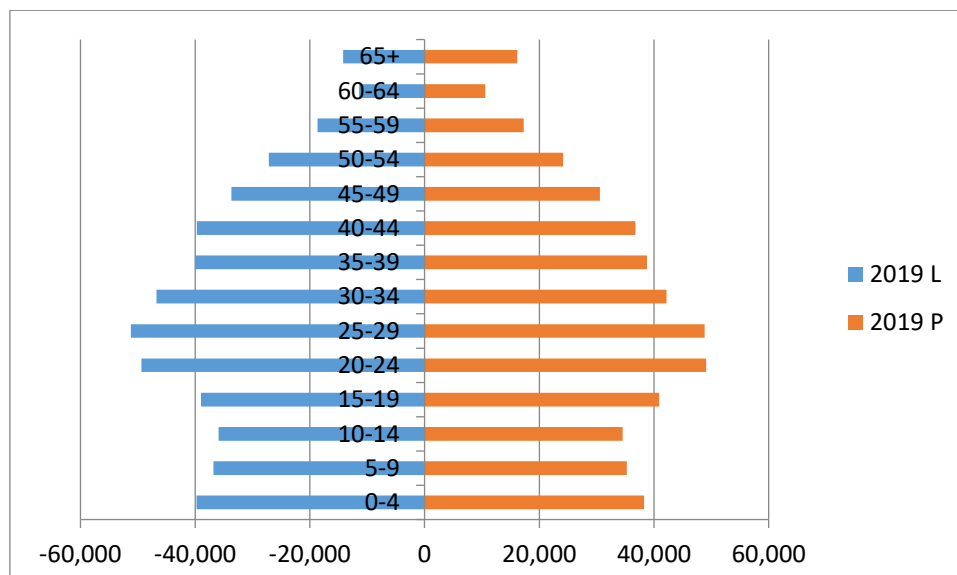
Sumber: Hasil Olahan, 2020

C. Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin

Struktur penduduk suatu wilayah dapat diketahui melalui pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Penyajian datanya digambarkan melalui piramida penduduk yang dapat menunjukkan rasio jenis kelamin per kelompok umur. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan atau dengan kata lain perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

Grafik 2.3

Piramida Penduduk Kota Denpasar Tahun 2019



Sumber : Hasil Olahan, 2020

Piramida penduduk Kota Denpasar tahun 2019 memiliki bentuk ekspansif atau muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang

meruncing. Piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida penduduk muda, jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Kondisi tersebut dapat menjadi potensi dan dapat pula menjadi masalah Kota Denpasar. Banyaknya penduduk usia muda berpotensi dalam penyediaan tenaga kerja, namun dapat menjadi masalah seperti pengangguran, jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan.

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kota
Denpasar Tahun 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk Laki-Laki	440.900	449.700	458.300	466.700	475.100	483.700
Penduduk Perempuan	422.700	430.900	439.000	447.600	455.500	463.400
Jumlah	863.600	880.600	897.300	914.300	930.600	947.100
Rasio Jenis Kelamin	104	104	104	104	104	104

Sumber: BPS Kota Denpasar; Hasil Olahan, 2020

Struktur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dari angka rasio jenis kelamin atau *sex ratio*. Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada waktu tertentu. Rasio jenis kelamin di Kota Denpasar pada enam tahun terakhir berada pada angka rata-rata sebesar 104. Artinya pada setiap 104 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

2.2.2. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pengelompokkan penduduk menurut umur dapat digunakan untuk menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan bagi setiap kelompok umur. Pengelompokan penduduk menurut kelompok umur dapat juga digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk dengan usia produktif, non produktif, maupun yang belum produktif.

Berdasarkan data tahun 2018, jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 220.627 jiwa (23,29%), sedangkan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 696.148 jiwa (73,50%) dari total penduduk Kota Denpasar. Dari data tersebut, dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebagai salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* suatu wilayah menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai/menanggung hidup penduduk yang belum produktif atau tidak produktif lagi, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan

tabel berikut ini, diketahui bahwa pada tahun 2019 Kota Denpasar memiliki rasio ketergantungan di bawah 36,05%. Hal ini menunjukkan bahwa beban usia produktif di Kota Denpasar masih rendah, yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif), mempunyai tanggungan sebanyak 36 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.7

Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun 2015-2019

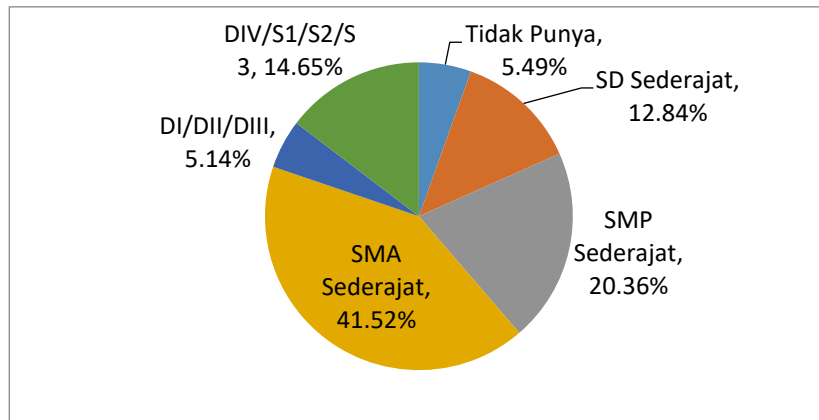
Kelompok Umur	2015		2016		2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
0-4	38.600	37.200	39.000	37.500	39.200	37.800	39.500	38.100	39.755	38.307
5-9	37.600	35.200	37.400	35.200	37.200	35.200	36.800	35.100	36.829	35.262
10-14	33.600	32.300	34.500	33.200	35.000	33.900	35.800	34.100	35.927	34.547
15-19	34.200	36.100	35.100	37.000	36.400	38.300	37.700	39.600	39.005	40.878
20-24	48.100	48.600	48.300	48.600	48.500	48.700	49.000	49.000	49.343	49.132
25-29	48.200	44.800	49.400	46.100	50.200	47.500	50.700	48.300	51.224	48.812
30-34	43.000	40.400	43.600	40.700	44.400	40.900	45.600	41.400	46.752	42.176
35-39	39.500	38.100	39.500	38.300	39.700	38.500	39.900	38.700	40.027	38.809
40-44	38.400	35.200	39.000	35.700	39.300	36.200	39.600	36.500	39.731	36.792
45-49	30.700	27.700	31.500	28.400	32.400	29.200	33.100	30.000	33.704	30.565
50-54	21.600	19.200	22.900	20.500	24.500	21.800	25.900	23.100	27.143	24.136
55-59	15.000	13.900	15.800	14.600	16.700	15.500	17.400	16.200	18.661	17.284
60-64	9.300	8.500	9.800	9.000	10.300	9.500	10.800	10.100	11.398	10.576
65+	11.900	13.700	12.500	14.200	12.900	14.600	13.300	15.300	14.193	16.148
Jumlah	449.700	430.900	458.300	439.000	466.700	447.600	475.100	455.500	483.692	463.424

Sumber : BPS Kota Denpasar Tahun 2020

2.2.3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dari jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas menurut status pendidikan terakhir yang ditamatkan. Penduduk Kota Denpasar sebagian besar berpendidikan SMU sederajat.

Pada grafik berikut dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Denpasar adalah lulusan SMU sederajat dengan persentase sebesar 41,52%. Terbanyak kedua yaitu lulusan SMP Sederajat sebesar 20,36%, diikuti dengan DIV/S1/S2/S3 sebesar 14,65% dan terdapat pula penduduk yang tidak memiliki pendidikan terakhir yang ditamatkan yaitu sebesar 5,49%. Kondisi ini menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk Kota Denpasar belum sepenuhnya memenuhi wajib belajar 12 tahun.



Grafik 2.4 .

Persentase Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Denpasar Tahun 2018

2.2.4. Penduduk Menurut Mata Pencapaian

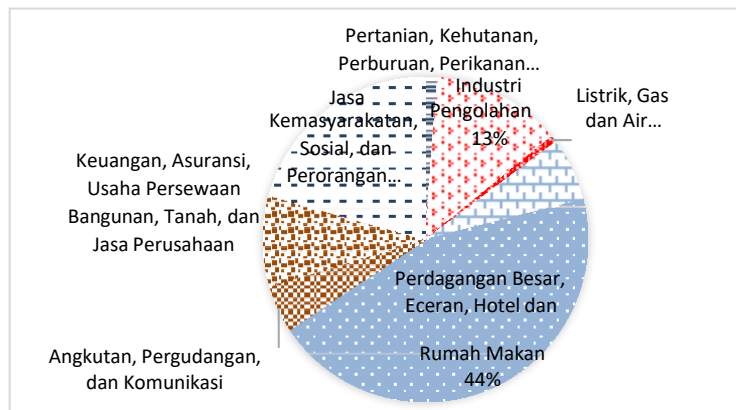
Mata pencapaian penduduk berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang bergerak di suatu wilayah. Berikut adalah tabel mengenai penduduk Kota Denpasar yang bekerja menurut lapangan usaha:

Tabel 2.8

Pekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha di Kota Denpasar Tahun 2014-2018

No	Sektor Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	6.115	6.144	6.144	6.860	6.278
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
3	Industri Pengolahan	58.378	48.863	48.863	67.194	66.606
4	Listrik, Gas dan Air	3.541	566	566	830	3.430
5	Bangunan	38.880	37.620	37.620	29.963	32.400
6	Perdagangan Besar, Eceran, Hotel dan Rumah Makan	195.205	20.739	220.739	211.632	230.541
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	27.729	25.912	25.912	33.291	24.367
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	26.326	30.745	30.745	36.039	46.420
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	104.961	97.926	97.926	116.100	106.600
10	Lain-lain	0	0	0	0	0
	Jumlah	461.135	268.515	468.515	501.909	516.642

Sumber : Kota Denpasar dalam Angka 2015-2019



Grafik 2.5

Persentase Jumlah Pekerja Menurut Sektor Lapangan Usahadi Kota Denpasar Tahun 2018

Sumber : Hasil Olahan, 2020

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2018 bekerja pada sektor perdagangan besar, eceran, hotel, dan rumah makan sebesar 44%. Terbanyak kedua yaitu pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebesar 21%, dan yang lainnya dari sektor industri pengolahan sebesar 13%. Kondisi ini sesuai dengan potensi Kota Denpasar, khususnya pariwisata yang menjadi unggulan wilayah ini. Sebagian besar masyarakat bergerak di bidang pariwisata yang didukung oleh kegiatan perdagangan, hotel, maupun rumah makan.

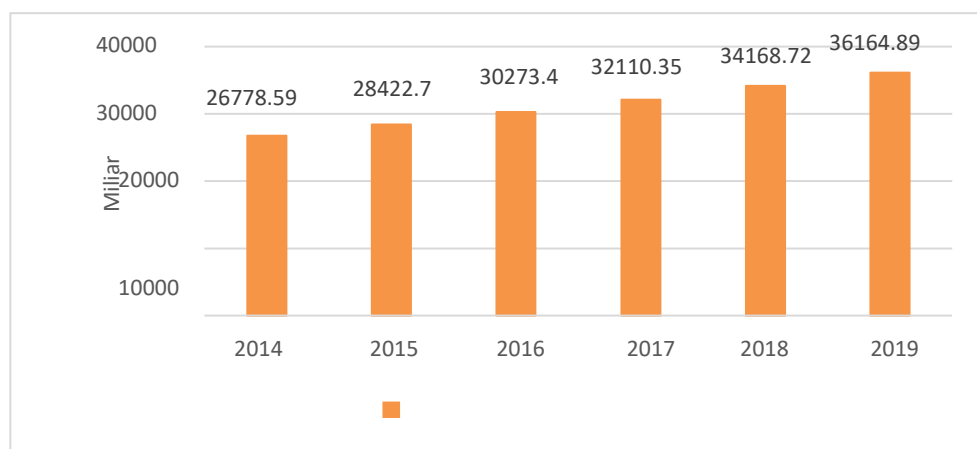
2.3. ASPEK DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN TINGKAT SASARAN (DAMPAK/IMPACT) PEMERINTAH DAERAH

2.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini mendeskripsikan tentang kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar sebagai bagian dari pengukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial dengan indikator-indikator pengukuran mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan hasil pembangunan (yang merupakan salah satu unsur) kesejahteraan masyarakat adalah dengan menganalisis pertumbuhan PDRB. Dengan mengetahui pertumbuhan PDRB yang merupakan jumlah nilai tambah kegiatan perekonomian masyarakat akan dapat dipahami dinamika hasil perekonomian yang terjadi.

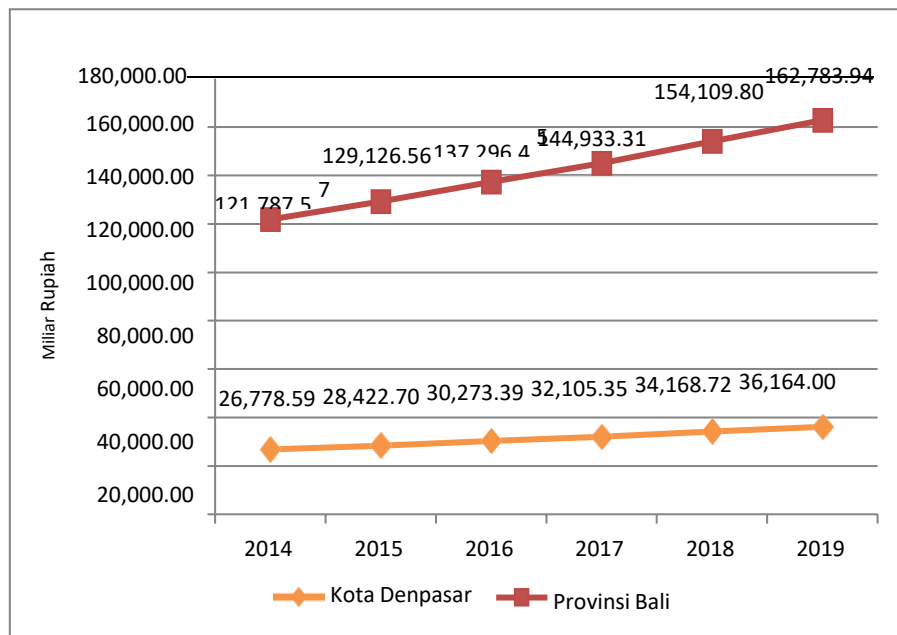


Grafik 2.6

Pertumbuhan Jumlah PDRB Kota Denpasar 2014-2019 Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2020

PDRB ADHK tahun dasar 2010 Kota Denpasar menunjukkan pertumbuhan positif pada 6 tahun terakhir, karena pertumbuhan PDRB yang selalu meningkat. PDRB ADHK Kota Denpasar tahun 2014 adalah sebesar 26.778 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 36.164 miliar rupiah pada tahun 2019.

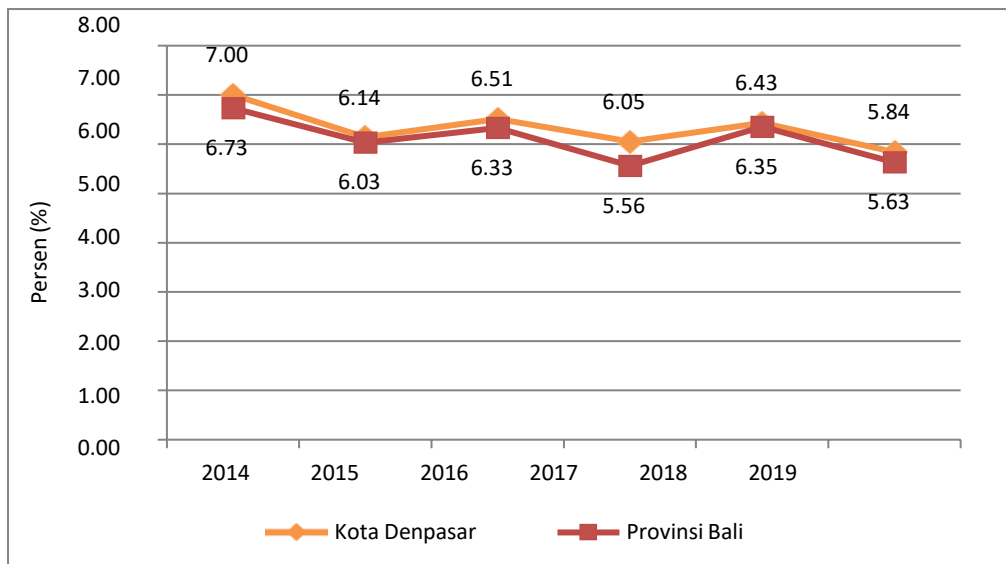


Grafik 2.7

Perkembangan Jumlah PDRB ADHK Kota Denpasar Tahun 2014-2019 Berdasarkan ADHK Tahun Dasar 2010 Dibandingkan Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Bali

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2020 dan 2018, Provinsi Bali dalam Angka 2020, 2019, 2015

PDRB ADHK dapat dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan perhitungan menggunakan PDRB ADHK, pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar selama enam tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif dengan tren peningkatan yang cenderung stabil. Pada tahun awal pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar berada pada angka 26.778 miliar di tahun 2014. Kemudian bertambah menjadi 28.422 miliar pada tahun 2015. Sampai pada tahun 2019, PDRB Kota Denpasar berada pada angka 36.164 miliar.



Grafik 2.8

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2014-2019

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2018, 2020 dan Provinsi Bali dalam Angka 2015, 2019, 2020

PDRB Kota Denpasar dari tahun 2014-2019 dilihat dari sisi jumlah selalu berada di bawah PDRB Provinsi Bali. Hal tersebut wajar karena jumlah PDRB Provinsi Bali merupakan gabungan beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi. Oleh karena itu, laju pertumbuhan lebih tepat digunakan untuk mengkomparasikan pertumbuhan PDRB Kota Denpasar dengan Provinsi Bali. Laju pertumbuhan PDRB Kota Denpasar dalam kurun waktu 2014 hingga 2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014, PDRB Kota Denpasar tumbuh sebesar 7% dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2015 tumbuh sebesar 6,14%; tahun 2016 sebesar 6,51%; selanjutnya tahun 2017 tumbuh sebanyak 6,05%, tahun 2018 sebesar 6,43%; dan pada tahun 2018 PDRB Kota Denpasar mengalami pertumbuhan terendah dengan 5,84%. Meskipun laju pertumbuhan PDRB Kota Denpasar mengalami fluktuasi, tetapi dalam kurun waktu 2014-2019 tersebut pertumbuhan setiap tahunnya selalu lebih tinggi dari Provinsi Bali. Melalui komparasi dengan level provinsi, laju pertumbuhan Kota Denpasar telah menunjukkan performa yang baik dan tren ini perlu dipertahankan kedepannya.

Di sisi lain, Denpasar sebagai sebuah kota didominasi oleh kegiatan ekonomi non-primer sehingga sumber PDRB didominasi dari sektor sekunder maupun tersier. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Kota Denpasar, tetapi juga terjadi pada wilayah-wilayah lain yang memiliki corak perkotaan dimana sektor primer tidak menjadi sektor utama. Sektor primer yang masih berkontribusi pada

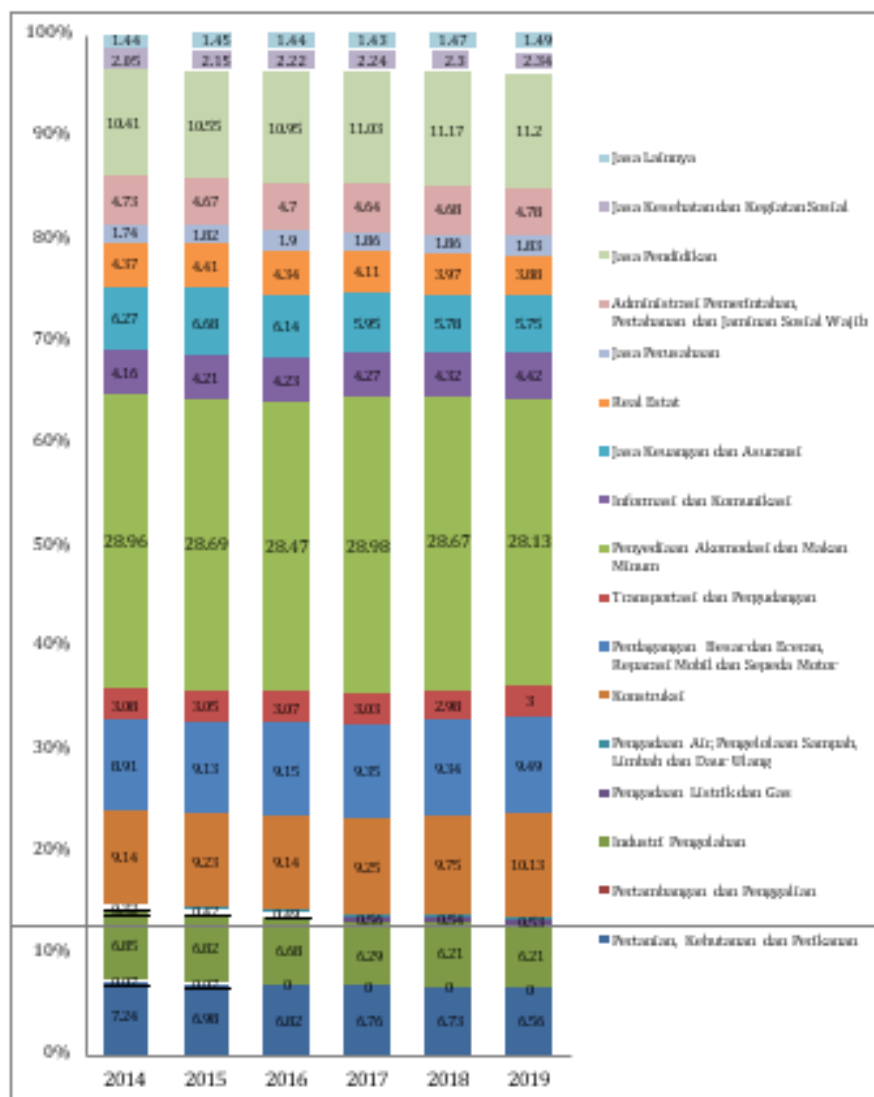
PDRB Kota Denpasar hingga tahun 2019 adalah sektor pertanian, sedangkan sektor pertambangan di Kota Denpasar sudah tidak menghasilkan sejak tahun 2016. Rincian mengenai kontribusi sektor dalam PDRB Kota Denpasar tahun 2014-2019 dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 – 2019 Atas Dasar Harga Berlaku 2010 di Kota Denpasar

No	Sektor/ Sub Sektor	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		Rupiah (M)	%	Rupiah (M)	%	Rupiah (M)	%	Rupiah (M)	%	Rupiah (M)	%	Rupiah (M)	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.989,62	7,24	1.959,25	6,98	1.985,97	6,82	2.090,03	6,76	2.186,11	6,73	2.256,85	6,56
2.	Pertambangan dan Penggalian	19,97	0,07	19,00	0,07	0		0		0		0	
3.	Industri Pengolahan	1.948,10	6,85	2.013,77	6,82	2.078,73	6,68	2.102,26	6,29	2.212,00	6,21	2.347,65	6,21
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	125,62	0,32	134,99	0,42	149,01	0,49	161,44	0,56	162,28	0,54	168,32	0,53
5.	Pengadaan Air, Penge-lolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	85,23	0,26	87,88	0,26	93,68	0,26	96,55	0,26	98,71	0,24	105,52	0,24
6.	Konstruksi	2.526,39	9,14	2.718,74	9,23	2.898,34	9,14	3.158,84	9,25	3.489,24	9,75	3.802,58	10,13
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.515,11	8,91	2.743,83	9,13	2.941,83	9,15	3.178,43	9,35	3.409,20	9,34	3.677,54	9,49
8.	Transportasi dan Pergudangan	856,36	3,08	908,22	3,05	980,22	3,07	1.041,10	3,03	1.098,36	2,98	1.168,58	3
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.318,39	28,96	6.612,85	28,69	7.020,35	28,47	7.598,34	28,98	8.055,70	28,67	8.337,92	28,13
10.	Informasi dan Komunikasi	1.386,00	4,16	1.517,98	4,21	1.657,98	4,23	1.792,92	4,27	1.941,12	4,32	2.117,28	4,42
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.696,85	6,27	1.792,42	6,68	1.952,82	6,14	2.013,28	5,95	2.085,18	5,78	2.207,94	5,75
12.	Real Estat	1.292,79	4,37	1.414,79	4,41	1.506,06	4,34	1.548,23	4,11	1.614,11	3,97	1.685,23	3,88
13.	Jasa Perusahaan	509,54	1,74	547,39	1,82	590,79	1,9	621,19	1,86	666,08	1,86	639,92	1,83
14.	Administrasi Pemerin-tahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.516,58	4,73	1.628,78	4,67	1.742,81	4,7	1.680,27	4,64	1.746,62	4,68	1.875,48	4,78
15.	Jasa Pendidikan	2.996,74	10,41	3.238,73	10,55	3.504,73	10,95	3.762,73	11,03	4.040,78	11,17	4.254,31	11,22
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	604,24	2,05	660,79	2,15	722,79	2,22	787,49	2,24	853,32	2,3	919,01	2,34
17.	Jasa Lainnya	396,13	1,44	423,28	1,45	447,28	1,44	471,28	1,43	509,90	1,47	564,70	1,49

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2018 dan 2020



Grafik 2.9

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB Kota Denpasar Tahun 2014 - 2018

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2015-2019

Tiga sektor yang menjadi kontributor utama dalam PDRB Kota Denpasar yaitu: (1) Penyediaan akomodasi dan makan minum, (2) Jasa Pendidikan, dan (3) Konstruksi, ketiganya menyumbang 49,48% pada PDRB Kota Denpasar tahun 2019. Sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum menjadi sektor yang paling mendominasi pada PDRB Kota Denpasar selama enam tahun terakhir. Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan Kota Denpasar sebagai lokasi destinasi pariwisata, baik domestik maupun mancanegara.

Dalam kurun waktu 2014 hingga 2019, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, serta kontruksi jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Tren tersebut tidak akan bertahan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi *covid-19*. Terlebih untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan pariwisata. Pada tahun 2020 sektor tersebut kemungkinan akan menurun drastis karena menyusutnya jumlah wisatawan. Penyusutan tajam terjadi akibat wisatawan mancanegara yang turun melebihi 99% sejak bulan April 2020. Tidak hanya kegiatan pariwisata, adanya *covid-19* berdampak pada perlambatan ekonomi Kota Denpasar secara keseluruhan ditandai nilai inflasi yang mencapai negatif pada bulan April, Mei, dan Juli 2020 sehingga ada kemungkinan terjadi penurunan pula pada dua sektor utama lainnya yaitu jasa pendidikan dan kontruksi. Oleh karena itu, pada tahun 2020 PDRB Kota Denpasar diperkirakan dapat mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Prediksi turunnya PDRB Kota Denpasar pada tahun 2020 berdasarkan kondisi perekonomian Provinsi Bali, perekonomian nasional, dan perekonomian global. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, ekonomi Bali pada triwulan II-2020 tercatat tumbuh negatif yaitu sebesar -7,22% dibandingkan triwulan I-2020, dan ketika dibandingkan dengan capaian triwulan yang sama pada tahun sebelumnya mencatatkan pertumbuhan negatif yang lebih dalam yaitu -10,98%. Jika dilihat dalam lingkup nasional, ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32% dan dibandingkan dengan triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19%. Berdasarkan publikasi katadata, IMF juga memproyeksikan ekonomi global akan mengalami resesi hingga -3%. Perlambatan ekonomi dalam lingkup provinsi, nasional, bahkan global tentunya akan berdampak pada PDRB Kota Denpasar. Perlambatan ekonomi dari lingkup lokal maupun global berakibat pada berkurangnya wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Denpasar sehingga penurunan PDRB tahun 2020 tidak dapat terelakkan.

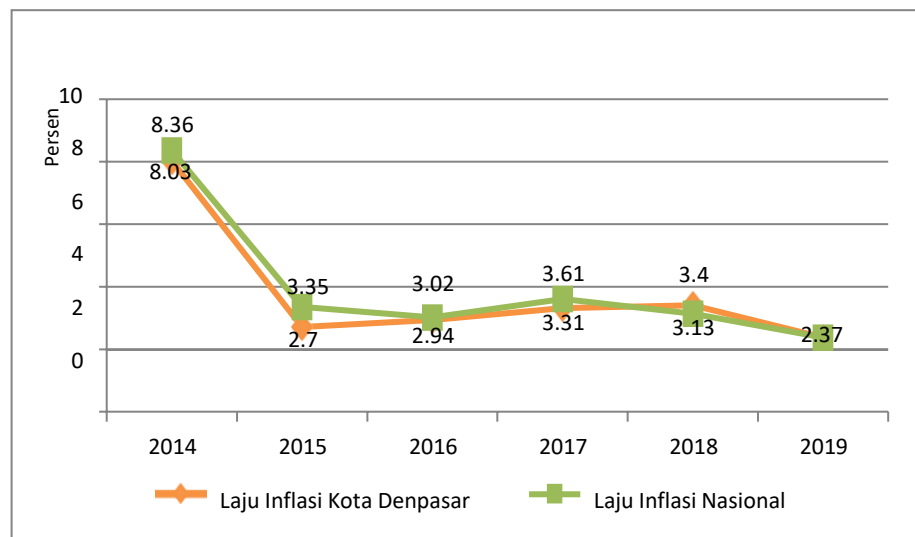
2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan peningkatan harga-harga umum dalam perekonomian yang terjadi secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Perkembangan kenaikan harga-harga umum dalam suatu periode waktu ke waktu tersebut disebut dengan laju inflasi. Inflasi yang terus meningkat dapat berakibat pada turunnya nilai mata uang sehingga mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat.

Tabel 2.10
Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2014 – 2019

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Laju Inflasi	%	8,03	2,70	2,94	3,31	3,40	2,37

Sumber: BPS Kota Denpasar



Grafik 2.10

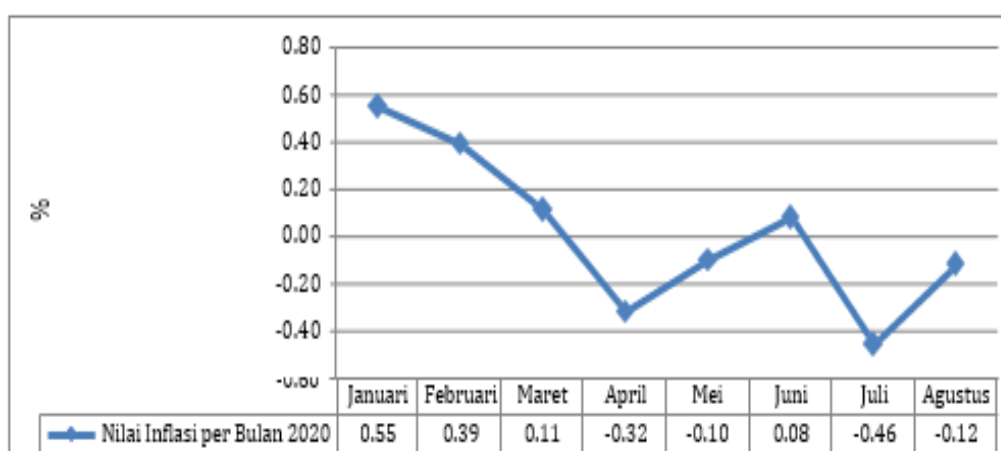
Laju Inflasi Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2014 – 2019

Sumber: BPS Kota Denpasar

Laju Inflasi Kota Denpasar selama enam tahun terakhir memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun awal, yaitu di 2014, laju inflasi Kota Denpasar memiliki nilai yang cukup tinggi, yaitu 8,03%. Kemudian mengalami penurunan cukup banyak pada 2015 sehingga menjadi 2,70%. Namun demikian, pada tahun berikutnya terjadi peningkatan yang bertahap, yaitu menjadi 2,94% pada tahun 2016, meningkat kembali menjadi 3,31% di tahun 2017, terus naik ke angka 3,40% pada 2018, dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 2,37%. Dibandingkan dengan nilai inflasi Nasional,

laju inflasi Kota Denpasar masih berada dibawahnya sehingga dapat dikatakan inflasi Denpasar lebih terkendali daripada level Nasional.

Sementara itu, dalam situasi pandemi *covid-19*, nilai inflasi Kota Denpasar mencapai nilai negatif (terjadi deflasi) pada bulan April, Mei, Juli, dan Agustus 2020. Pada bulan Juli 2020, deflasi mengalami nilai tertinggi dengan nilai -0,46%, hal tersebut menempatkan Kota Denpasar sebagai kota dengan nilai deflasi terdalam nomor 8 dari 61 kota yang mengalami deflasi.



Grafik 2.11

Perkembangan Inflasi Kota Denpasar

Bulan Januari sampai dengan Agustus Tahun 2020

Sumber: denpasarkota.bps.go.id

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Analisis PDRB per kapita merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat perolehan hasil nilai kegiatan perekonomian daerah (*value added*) dengan asumsi dibagi secara merata. PDRB per kapita Kota Denpasar didapatkan dari hasil pembagian PDRB kota dengan jumlah penduduk di kota tersebut. Berikut ini perkembangan PDRB per kapita Kota Denpasar:

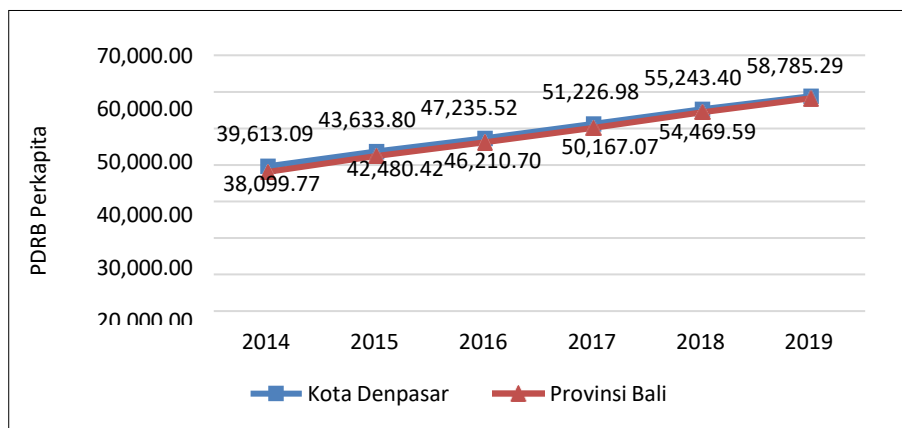
Tabel 2.11.

PDRB Per kapita Kota Denpasar Tahun 2014 – 2019

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB ADHK (Miliar Rp)	26.778,59	28.422,70	30.273,39	32.109,43	36.168,10	36.164,89
PDRB Per kapita (Juta Rp/ Jiwa)	31.008,09	32.276,51	33.738,32	35.114,68	36.716,87	38.184,87
PDRB ADHB (Miliar Rp)	34.209,87	38.423,92	42.384,43	47.001,77	51.440,63	55.676,48
PDRB Per kapita (Juta Rp/ Jiwa)	39.613,09	43.633,80	47.235,52	51.226,98	55.243,40	58.785,29

Sumber: BPS Kota Denpasar

PDRB per kapita Kota Denpasar mengalami peningkatan setiap tahunnya selama enam tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan menggunakan data PDRB ADHK, PDRB per kapita Kota Denpasar memiliki kisaran peningkatan sekitar Rp1.300 juta setiap tahunnya dan sekitar Rp4.000 juta tiap tahun apabila PDRB per kapita Kota Denpasar menggunakan data PDRB ADHB. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, maka PDRB per kapita Kota Denpasar masih berada pada posisi yang lebih baik.



Grafik 2.12

Perkembangan PDRB per Kapita Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2014–2019

Sumber: BPS Kota Denpasar dan BPS Provinsi Bali

4. Indeks Gini/ Koefisien Gini

Indeks gini merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk. Nilai indeks gini berkisar antara nol sampai dengan satu. Nilai indeks gini yang semakin mendekati angka nol menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan semakin baik atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki

pendapatan yang hampir sama. Sementara itu, nilai indeks gini yang semakin mendekati angka satu menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat makin besar.

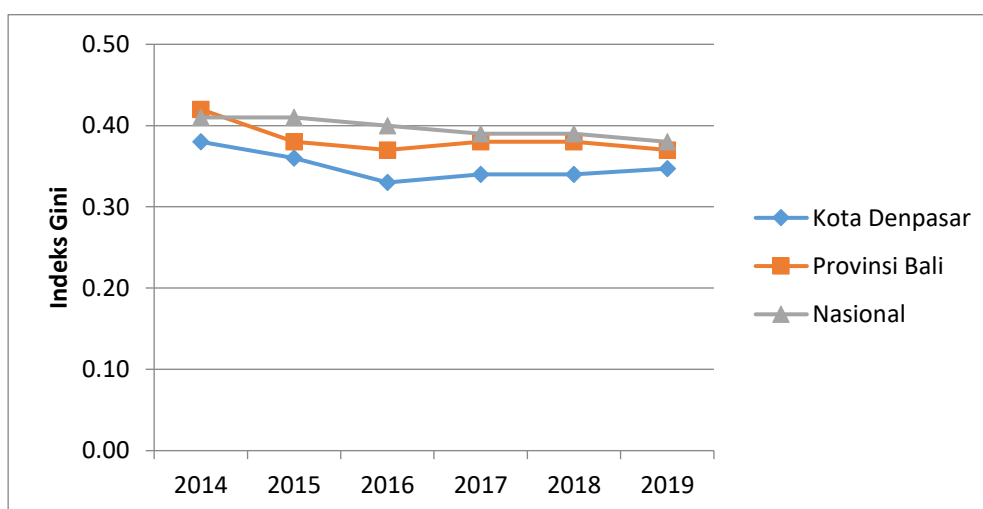
Tabel 2.12.

Indeks Gini Kota Denpasar Tahun 2014 – 2019

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indeks Gini	0,38	0,36	0,33	0,34	0,34	0,347
2.	Kriteria Ketimpangan	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang

Sumber: Dokumen PDRB Kota Denpasar menurut Pengeluaran 2014-2019; dan BPS Kota Denpasar

Indeks Gini Kota Denpasar cenderung stabil selama lima tahun terakhir. Tahun 2014 indeks gini Kota Denpasar mencapai angka 0,38 namun menurun di angka 0,36 pada 2015 dan 0.33 pada 2016. Setelah sempat menurun, angka tersebut kembali mengalami peningkatan ke angka 0,34 pada tahun 2017 dan berangsur stabil sampai pada tahun 2018.



Grafik 2.13

Perkembangan Indeks Gini Kota Denpasar Dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014–2018

Sumber: Website BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik tersebut menggambarkan perbandingan antara indeks gini Kota Denpasar dengan indeks gini Provinsi Bali dan nasional. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa baik Kota Denpasar maupun Provinsi Bali memiliki perkembangan angka yang fluktuatif sedangkan nasional cenderung stabil. Indeks gini nasional dan Provinsi Bali memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan indeks gini Kota Denpasar. Hal ini

mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan di Kota Denpasar masih lebih baik dari Provinsi Bali maupun nasional, atau dengan kata lain ketimpangan pendapatan di Kota Denpasar masih lebih rendah dibanding Provinsi Bali dan Nasional. Meskipun nilai indeks gini Kota Denpasar sudah lebih baik dari provinsi maupun nasional, tetapi pemerataan pendapatan masih perlu dilakukan sehingga kriteria ketimpangan tidak lagi berada pada level sedang tetapi dapat berada pada level rendah.

5. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin)

Garis kemiskinan adalah salah satu indikator untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan didapatkan dari penjumlahan Garis Kemiskinan

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM). Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro utama pengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan dan dapat menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah serta menjadi prioritas dalam rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Tabel 2.13

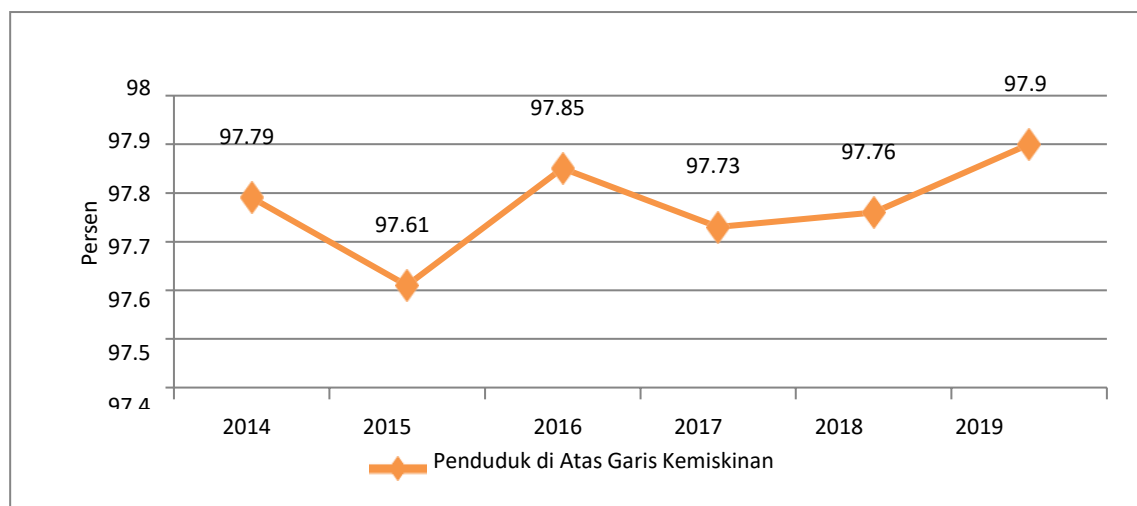
Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Denpasar 2014-2019

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Denpasar							
Garis Kemiskinan	(Rp/ Kapita/Bulan)	426.513	463.271	483.821	512.947	545.357	571.246
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	19.200	20.940	19.170	20.700	20.724	19.830
Presentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	2,21	2,39	2,15	2,27	2,24	2,10
Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	(%)	97,79	97,61	97,85	97,73	97,76	97,90
Provinsi Bali							
Garis Kemiskinan	(Rp/ Kapita/Bulan)	301.747	321.834	338.967	361.387	382.598	400.624
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	196.000	196.710	178.180	180.130	171.760	163.850
Presentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	4,76	4,74	4,25	4,25	4,01	3,79
Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	(%)	95,24	95,26	95,75	95,75	95,99	96,21

Nasional							
Garis Kemiskinan	(Rp/ Kapita/Bulan)	312.328	344.809	361.990	387.160	410.670	440.538
Jumlah Penduduk Miskin	Juta Jiwa	27,73	28,51	27,76	26,58	25,67	24,79
Presentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	10,96	11,13	10,7	10,12	9,82	9,22
Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	(%)	89,04	88,87	89,3	89,88	90,18	90,78

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2020, BPS Kota Denpasar, BPS Indonesia

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase penduduk Kota Denpasar yang berada di atas garis kemiskinan cenderung stabil di kisaran 97% dalam enam tahun terakhir. Pada tahun awal, persentase penduduk Kota Denpasar yang berada di atas garis kemiskinan mengalami penurunan, dari 97.79% pada tahun 2014 menjadi 97.61% pada 2015. Di tahun berikutnya yaitu 97.85% di tahun 2016, menyusut menjadi 97.73% pada 2017 dan kembalinaik di angka 97,90% dua tahun setelahnya.

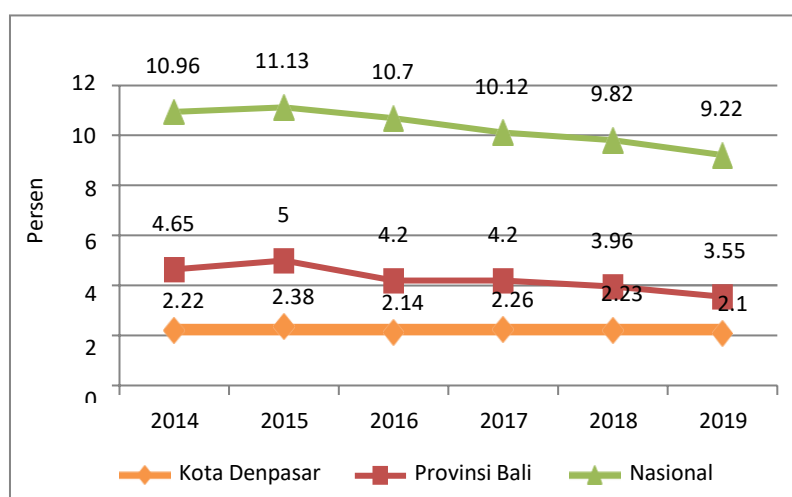


Grafik 2.14

Perkembangan Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Kota Denpasar Tahun 2014 – 2019

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2019 (diolah); dan BPS Kota Denpasar

Sementara itu, persentase penduduk Provinsi Bali yang berada di atas garis kemiskinan mengalami fluktuasi selama enam tahun terakhir, yaitu dari 95,24% pada tahun 2014 menjadi 95,26% pada tahun 2015. Persentase tersebut kemudian kembali meningkat sampai dengan tahun 2019 menjadi 96,21%. Demikian pula jika dilihat secara nasional, persentase penduduk di atas garis kemiskinan juga mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019 menjadi 90,78%. Adapun jika dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin, baik Kota Denpasar, Provinsi Bali maupun nasional, mengalami penurunan.



Grafik 2.15

Perkembangan Presentase Jumlah Penduduk Miskin di Kota Denpasar
Dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014–2019
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2019 (diolah); BPS Kota
Denpasar; dan BPS Indonesia

Grafik tersebut menggambarkan perbandingan antara persentase penduduk miskin Kota Denpasar dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Bali dan Nasional. Dapat dilihat bahwa dari ketiganya memiliki perkembangan angka persentase penduduk miskin yang cenderung menurun, dan posisi Kota Denpasar berada di bawah Provinsi Bali maupun Nasional.

Meskipun dalam kurun waktu 2014-2019 persentase jumlah penduduk miskin Kota Denpasar ada kecenderungan tren positif, namun jumlah penduduk miskin tahun 2020 perlu mendapat perhatian. Pandemi covid-19 telah memperlambat perekonomian, tidak hanya konteks Kota

Denpasar, tetapi juga nasional bahkan global, sehingga terdapat kemungkinan bahwa jumlah penduduk miskin akan meningkat. Hal tersebut perlu dipantau dan ditindaklanjuti supaya kemiskinan khususnya di Kota Denpasar dapat ditangani dengan lebih baik.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Ukuran pembangunan yang digunakan yaitu PDB (dalam konteks nasional) dan PDRB (dalam konteks regional), hanya mampu memotret pembangunan ekonomi saja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif yang mampu mencerminkan perkembangan ekonomi sekaligus perkembangan aspek sosial kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Indikator ini penting karena melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan oleh suatu wilayah.

IPM dengan metode baru menggunakan indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah sehingga dapat diperoleh gambaran lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi, serta Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang lebih dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Berdasarkan ketentuan *United Nation Development Programe* (UNDP), penghitungan IPM untuk seluruh negara menggunakan metode baru. Pada metode baru ini, angka melek huruf digantikan dengan angka harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan *geometric mean*. Dampak dari perubahan penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahan angka IPM menjadi lebih rendah dibanding metode lama.

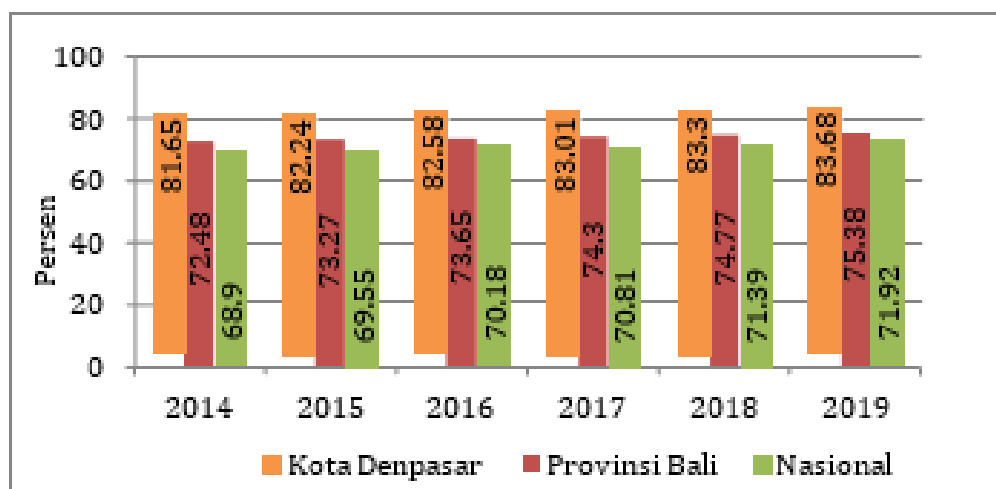
Tabel 2.14

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Denpasar 2014 - 2019

Indikator IPM	Satuan	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka harapan hidup	Tahun	73,71	73,91	74,04	74,17	74,38	74,68
Harapan Lama Sekolah (Thn)	Tahun	13,46	13,75	13,76	13,97	13,98	13,99
Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,96	11,02	11,14	11,15	11,16	11,23
Daya Beli (PPP)	Ribu Rp	18.605	18.849	19.084	19.364	19.698	19.992
IPM Kota Denpasar		81,65	82,24	82,58	83,01	83,30	83,68
IPM Provinsi Bali		72,48	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38
IPM Nasional		68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

Sumber: bps.go.id

Secara umum, selama rentang tahun 2014 hingga 2019, nilai IPM Kota Denpasar mengalami peningkatan nilai yang cukup baik. Peningkatan nilai IPM tersebut disertai dengan peningkatan pada ketiga komponen indikator IPM. Selain perkembangan positif nilai indikator IPM Kota Denpasar per tahunnya, nilai IPM Kota Denpasar selama rentang tahun 2014 hingga 2019 selalu berada di atas nilai IPM Provinsi Bali dan Nasional/ Indonesia, seperti tertera pada grafik berikut.



Grafik 2.16.

Perkembangan IPM Kota Denpasar dibandingkan IPM Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014-2019

Sumber: bps.go.id; hasil olahan 2020

Meskipun IPM Kota Denpasar telah melampaui rata-rata Provinsi Bali maupun nasional, namun capaian ini dirasa masih kurang optimal, terlebih lagi pada masa kondisi pandemi *covid-19*, ketiga komponen IPM dimungkinkan akan mengalami penurunan.

7. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

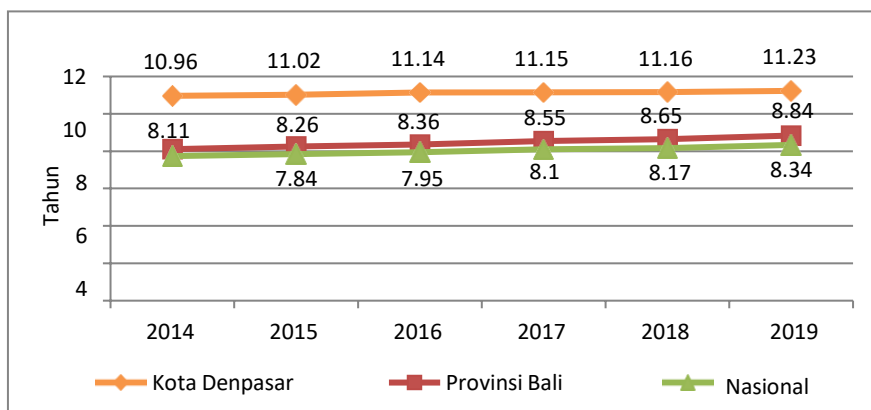
Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Berdasarkan data tahun 2014-2019, Kota Denpasar secara umum menunjukkan fluktuasi rata-rata lama bersekolah.

Tabel 2.15

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Denpasar 2014 - 2019

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10.96	11.02	11.14	11.15	11.16	11.23

Sumber: BPS Kota Denpasar; Lembar Kerja Indikator Kinerja Sektor Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



Grafik 2.17

Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014-2019

Sumber: BPS Kota Denpasar; Lembar Kerja Indikator Kinerja Sektor Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Tahun 2014 hingga 2019 angka rata-rata lama sekolah Kota Denpasar terus meningkat. Pada awal tahun berada pada nilai 10,96 tahun dan terus meningkat, berakhir di 11,23 tahun pada 2019. Dibandingkan dengan level Provinsi Bali maupun Nasional, angka rata-rata lama sekolah Kota Denpasar dari tahun 2014-2019 juga telah melampaui capaian provinsi maupun nasional. Performa yang sudah lebih baik dari provinsi dan nasional serta sudah adanya tren peningkatan perlu dipertahankan kedepannya supaya wajib belajar 12 tahun bisa terpenuhi di Kota Denpasar.

8. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH merupakan alat evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka harapan hidup di Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2014 sampai 2019.

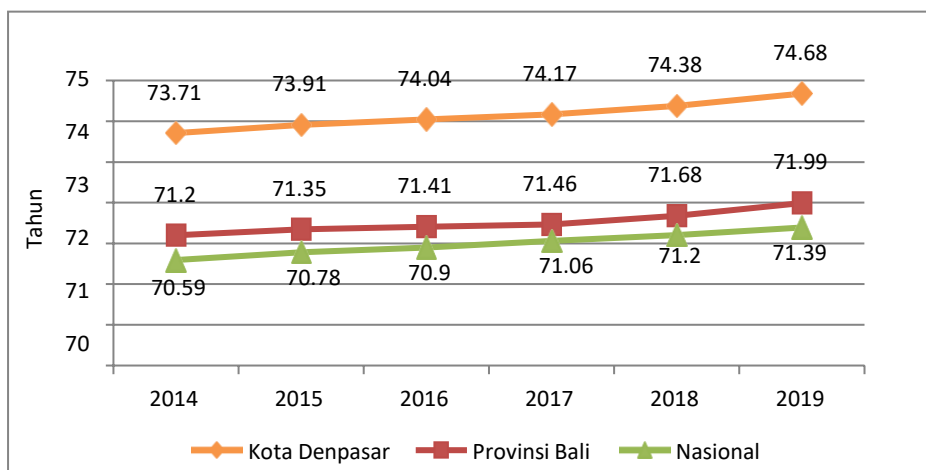
Tabel 2.16

Angka Harapan Hidup Kota Denpasar 2014 - 2019

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,71	73,91	74,04	74,17	74,38	74,68

Sumber: BPS Kota Denpasar

Pada tahun 2014 angka usia harapan hidup di Kota Denpasar 73,71 tahun meningkat menjadi sebesar 73,91 tahun pada tahun 2015. Kemudian terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 menjadi 74,68 tahun. Selama rentang tahun 2014 hingga 2019, angka usia harapan hidup Kota Denpasar selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali dan nasional.



Grafik 2.18

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014-2019

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2019 dan Website CNBC Indonesia (diolah)

9. Persentase Balita Gizi Buruk

Berdasarkan petunjuk penyusunan profil kesehatan kabupaten/kota, definisi balita gizi buruk ialah balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) yang memiliki $Z\text{-score} < -3$ SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (*marasmus*, *kwasiorkor*, dan *marasmus kwasiorkor*). Persentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah seluruh balita di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama.

Persentase balita gizi buruk di Kota Denpasar secara umum mengalami tren yang menurun dan sudah melampaui target. Menurunnya persentase gizi buruk pada balita disebabkan penerapan surveilans aktif yang mengakibatkan penemuan lebih dini penderita gizi buruk.

Tabel 2.17

Presentase Balita Gizi Buruk di Kota Denpasar 2014 – 2019

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk	Kasus	12	10	3	5	2	0
2.	Jumlah Balita	Anak	75.500	75.800	76.500	77.000	77.600	61.796
3.	Presentase Balita Gizi Buruk	%	0,016	0,013	0,004	0,006	0,003	0
	Target	%	10	10	10	8	6	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2020

Kejadian gizi buruk dapat disebabkan oleh berbagai hal, beberapa di antaranya karena asupan balita yang tidak sesuai dibandingkan kebutuhannya. Secara tidak langsung pola konsumsi balita dipengaruhi oleh pola asuh orang tua terutama ibu, yang dipengaruhi oleh pengetahuan ibu mengenai makanan dan pola asuh. Upaya yang sudah dilakukan di Kota Denpasar adalah intensifikasi penyuluhan dan konseling gizi di posyandu kepada ibu balita tentang pemberian asupan makanan yang memenuhi gizi seimbang dengan baik dan benar bagi balita, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap balita kurang gizi, ibu hamil KEK dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), serta perawatan terhadap semua balita gizi buruk yang ditemukan.

10. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang/*underweight* adalah balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) berada pada rentang *Z-Score* antara -2 SD dan -3 SD. Salah satu agenda SDGs adalah menurunkan prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita, dimana target nasional pada tahun 2019 adalah 17%.

Tabel 2.18

Presentase Balita Gizi Kurang di Kota Denpasar 2014 – 2019

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Balita Gizi Kurang	Kasus	471	396	118	175	72	151
2.	Jumlah Balita	Anak	75.500	75.800	76.500	77.000	77.600	61.796
3.	Presentase Balita Gizi Kurang	%	0,62	0,52	0,15	0,23	0,09	0,24
	Target	%	10	10	10	8	6	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa prevalensi balita gizi kurang di Kota Denpasar masih fluktuatif tapi cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan telah melampaui target. Pada tahun 2014 terdapat 0,62% balita dengan gizi kurang dan pada tahun 2019 terdapat 0,24% balita dengan gizi kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Denpasar telah memiliki akses pangan yang baik dan sudah memiliki cukup pengetahuan mengenai kesehatan gizi terutama bagi balita.

11. Prevalensi Stunting

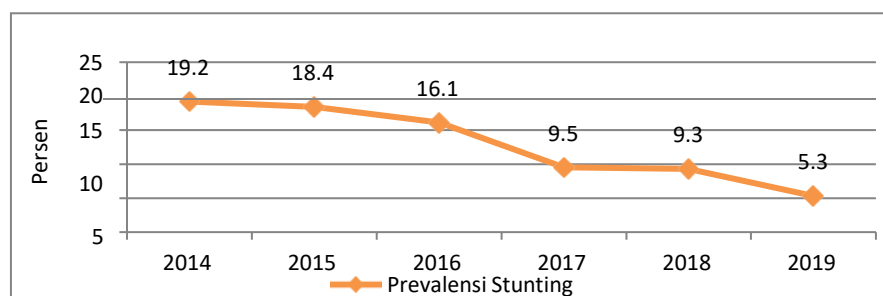
Prevalensi stunting adalah prevalensi balita dengan pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai menurut umur (pendek). Seorang anak dianggap mengalami stunting jika tinggi badan mereka lebih rendah (kerdil) dari standar usianya yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi.

Tabel 2.19

Prevalensi Stunting di Kota Denpasar 2014 - 2019

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Prevalensi stunting (pendek/sangat pendek) anak ≤ 2 tahun	%	19,20	18,14	16,10	9,50	9,30	5,30
	Target	%				<28	<28	<28

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2020



Grafik 2.19.

Perkembangan Prevalensi Stunting Kota Denpasar Tahun 2014–2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2020

Pada tahun 2014 hingga 2019, prevalensi stunting di Kota Denpasar terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014, prevalensi stunting mencapai angka 19,20% dan terus menurun setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 prevalensi stunting Kota Denpasar sebesar 5,30%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan standar WHO yang menargetkan persentase stunting <20%, maka realisasi prevalensi stunting di Kota Denpasar telah mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini perlu dioptimalkan untuk meminimalisir kondisi balita yang memiliki keterbatasan fisik maupun intelektual yang disebabkan oleh kurangnya gizi yang didapatkan.

12. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2014, angka partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar yaitu 72,49 dan pada tahun 2019 angka partisipasi angkatan kerja sebesar 71,71. Dalam selang waktu tersebut terjadi penurunan maupun peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar, meskipun dalam kurun waktu 2017-2019 terdapat tren penurunan angka partisipasi angkatan kerja. Penurunan angka partisipasi angkata kerja

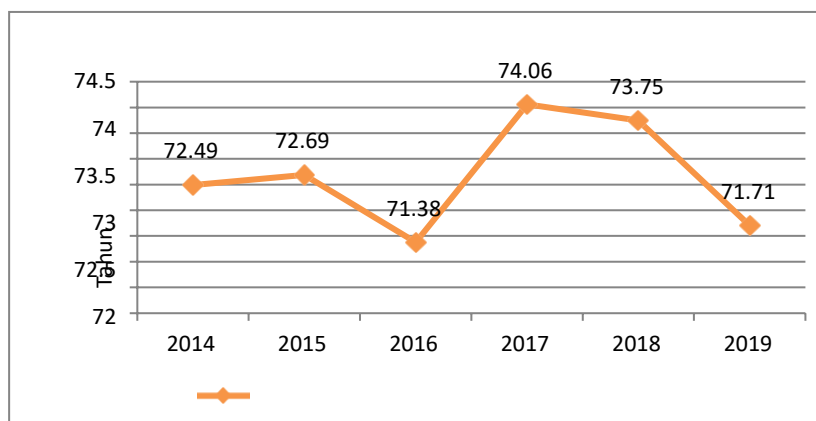
tersebut menjadi menjadi sinyal adanya permasalahan ketenagakerjaan di Kota Denpasar karena terjadi penurunan angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2017-2019. Hal tersebut dapat dikuatkan dengan menganalisis tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih dapat merepresentasikan ketersediaan tenaga kerja di Kota Denpasar.

Tabel 2.20

Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Denpasar 2014 - 2019

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angkatan Kerja Usia 15 tahun ke Atas	Jiwa	72,49	72,69	71,38	73,91	73,75	71,71
2.	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas	Jiwa	651.300	668.320	680.500	697.435	713.476	728.850
3.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,49	72,69	71,38	74,06	73,75	71,71

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020



Grafik 2.20

Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Denpasar Tahun 2014–2019

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020

13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Ketenagakerjaan adalah aspek lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan suatu wilayah. Produktivitas dan daya serap tenaga kerja menjadi tolok ukur perekonomian wilayah dan kesejahteraan penduduk. Angka partisipasi angkatan kerja merupakan proporsi penduduk umur 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam golongan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Selain angka partisipasi angkatan

kerja, TPAK merupakan cara lain dari penulisan angka perbandingan angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, usia penduduk yang masuk dalam perhitungan adalah usia penduduk produktif yakni 15-64 tahun.

Tabel 2.21

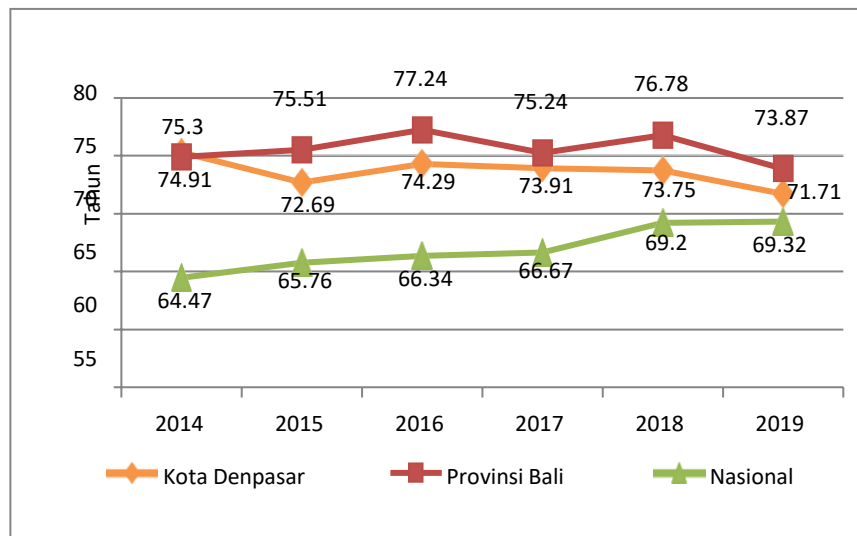
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Denpasar 2014 - 2019

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Orang	472.103	485.724	485.724	515.465	526.205	522.661
No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 tahun)	Orang	627.000	668.230	653.800	697.435	713.476	728.850
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,30	72,69	74,29	73,91	73,75	71,71

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020

Dalam rentang waktu enam tahun terakhir, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Denpasar cenderung mengalami penurunan. Pada 2015 ke 2016 sempat meningkat, namun selebihnya menurun, yaitu berakhir di angka 71,71% pada tahun 2019. Ketika dibandingkan Provinsi Bali, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar juga masih lebih rendah pada tahun 2015-2019, meskipun jika dibandingkan dengan level nasional capaian Kota Denpasar masih lebih baik. Adanya tren penurunan, bahkan realisasi tahun 2019 masih lebih rendah dari tahun 2014, serta realisasi yang masih lebih rendah dari Provinsi Bali mengindikasikan adanya permasalahan ketenagakerjaan di Kota Denpasar.

Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi suatu hal yang penting karena berkaitan dengan ketersediaan angkatan kerja yang dapat berpartisipasi dalam perekonomian. Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja dalam jangka panjang dapat berakibat pada kebutuhan tenaga kerja yang dipenuhi oleh penduduk non-lokal, dan hal tersebut akan lebih menjadi masalah ketika keterbatasan angkatan kerja di Kota Denpasar diikuti dengan kualitas angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan ataupun bersertifikasi.



Grafik 2.21

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014–2019

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020, Statistik Ketenagakerjaan Bali dan Nasional (diolah)

14. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran menjadi penting karena seringkali menjadi isu pengembangan wilayah dan menghambat pertumbuhan perekonomian. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu perhitungan yang mewakili gambaran pengangguran di suatu daerah. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Jika dilihat dari data tingkat pengangguran terbuka pada level provinsi, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali berada di bawah tingkat pengangguran Kota Denpasar.

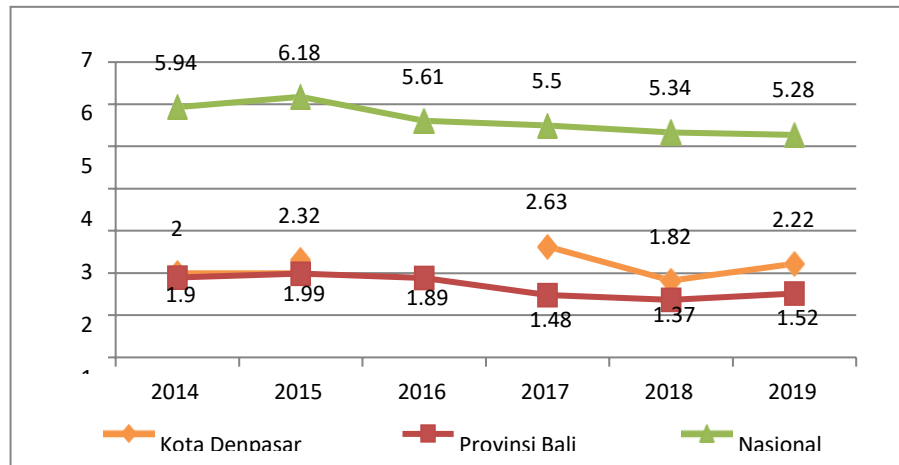
Tabel 2.22

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2014 - 2019

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pengangguran Terbuka	Orang	10.968	17.209	-	13.556	9.563	11.589
2.	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Orang	472.103	485.724	-	515465	526205	522.661
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar	%	2,32	3,54	-	2,63	1,82	2,22
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka Bali	%	1,90	1,99	1,89	1,48	1,37	1,52
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	%	5,94	6,18	5,61	5,50	5,34	5,28

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dari 2014 ke 2019. Pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar sebesar 2,32% kemudian mengalami peningkatan menjadi 3,54% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 data mengenai tingkat terbuka Kota Denpasar tidak tersedia dan pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,63% dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 sebesar 2,22%. Meskipun tingkat pengangguran terbuka tersebut telah lebih rendah daripada capaian Nasional, namun persentase tingkat pengangguran Kota Denpasar masih lebih tinggi dari Provinsi Bali. Realisasi tersebut dapat menjadi indikator bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kota Denpasar masih menjadi suatu hal yang perlu di prioritaskan. Pernyataan tersebut didasarkan pada kecenderungan capaian yang masih lebih rendah dari Bali dengan tren yang masih berfluktuasi. Terlebih lagi pada tahun 2020 akibat adanya *covid-19* diprediksi akan berdampak pada semakin meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, terlebih lagi kegiatan pariwisata sebagai kegiatan utama Kota Denpasar yang terhenti akibat kejadian luar biasa. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar mengingat pengangguran dapat berdampak pada aspek-aspek lain dan tidak muncul begitu saja tetapi disebabkan oleh akumulasi beragam masalah yang perlu dianalisis lebih lanjut.



Grafik 2.22
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014–2019
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020, Statistik Ketenagakerjaan Bali dan Nasional (diolah)

15. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja pada kelompok umur produktif. Rasio penduduk yang bekerja menunjukkan ketersediaan lapangan kerja dan daya serap terhadap jumlah angkatan kerja yang ada. Makin tinggi nilai rasio penduduk yang bekerja, makin besar daya serap tenaga kerja.

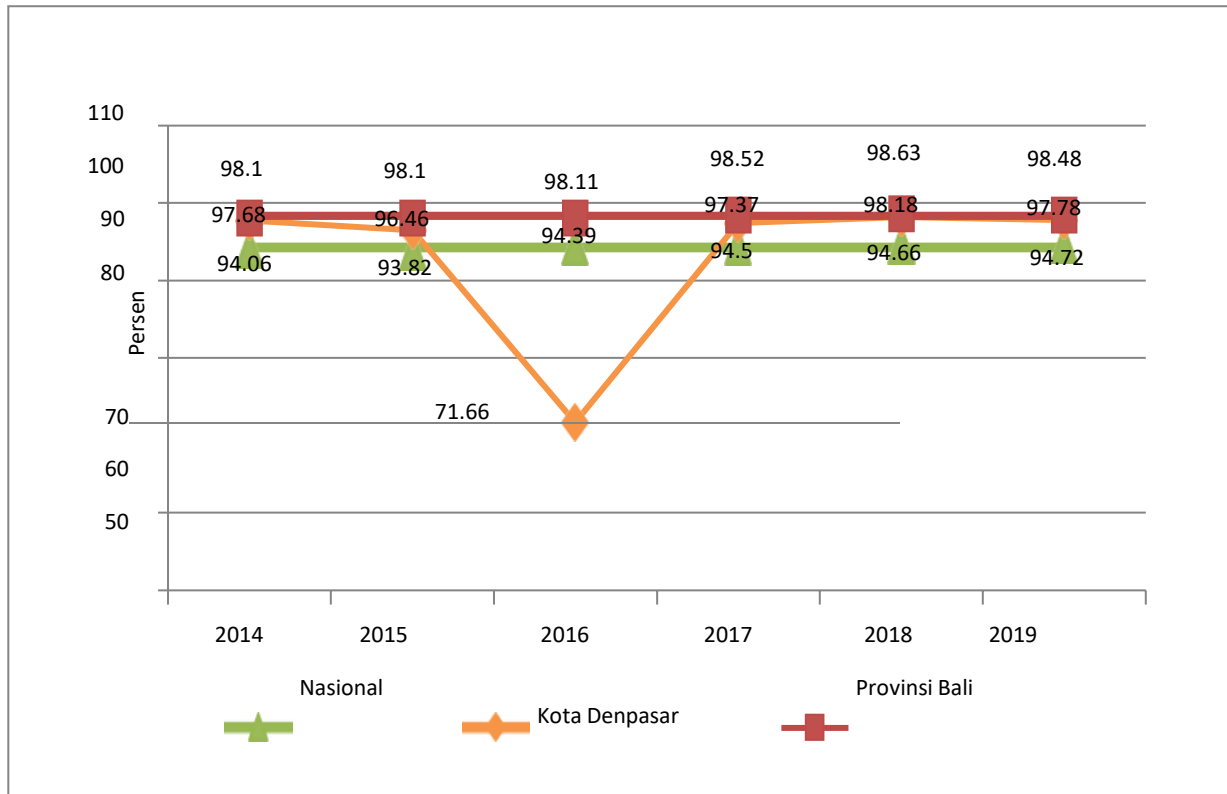
Tabel 2.23
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Denpasar Tahun 2014 - 2019

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penduduk yang Bekerja	Orang	461.150	468.515	468.515	501.909	516.642	511.072
2.	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	472.103	485.724	653.800	515.465	526.205	522.661
3.	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	97,68	96,46	71,66	97,37	98,18	97,78

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020

Rasio penduduk yang bekerja di Kota Denpasar selama kurun waktu 2014-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 rasio penduduk yang bekerja sebanyak 97,68%. Mengalami penurunan hingga akhirnya meningkat cukup jauh menjadi 98,18% pada tahun 2018 dan kembali menurun menjadi 97,78% di tahun 2019. Meskipun fluktuatif, rasio penduduk yang bekerja di Kota Denpasar telah melampaui capaian level nasional tetapi masih sedikit lebih rendah daripada capaian Provinsi Bali.

Hal ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa ketenagakerjaan masih menjadi salah satu masalah Kota Denpasar diindikasikan dengan rasio penduduk yang bekerja yang masih di bawah capaian provinsi.



Grafik 2.23

Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Denpasar
Dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014–2019

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020, Statistik Ketenagakerjaan Bali dan Nasional (diolah)

16. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas menunjukkan seberapa besar peluang penduduk usia 15 tahun ke atas untuk mendapatkan pekerjaan dari jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini penting untuk diketahui terkait dengan upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka yang dilakukan oleh daerah.

Tabel 2.24

Rasio Kesempatan Kerja Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Denpasar 2014 - 2019

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kesempatan Kerja	Orang	636.190	644.661	-	6696.48	688.477	-
2.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Orang	651.300	668.230	680.500	697.435	713.476	728.850
3.	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	%	97,68	96,46	-	96,21	96,50	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas Kota Denpasar secara umum cenderung stabil di kisaran angka 96%. Pada tahun 2016, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas tidak dapat dituliskan datanya karena keterbatasan data. Peningkatan rasio kesempatan kerja yang mulai terjadi sejak tahun 2018.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN KOTA DENPASAR

3.1 Kemiskinan Mikro dan Makro

Program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran tentu saja berawal dari ketersediaan data kemiskinan yang terpercaya, mencakup siapa dan dimana kelompok-kelompok masyarakat miskin yang harus menjadi fokus perhatian dan keprihatinan umum (Sen, 1981). Cara memperoleh data kemiskinan biasanya dibedakan menjadi dua jenis, yakni pendekatan makro dan mikro.

Pendekatan pertama, yaitu kemiskinan makro yang dikeluarkan oleh BPS adalah data kemiskinan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Baru di tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Selanjutnya, sejak tahun 2002 BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota (Cahyat, 2004). Selain Susenas digunakan juga Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) sebagai informasi tambahan yang dipakai untuk memperkirakan proporsi pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan. Dari kebutuhan dasar ini dihitung suatu garis yang disebut garis kemiskinan, yakni nilai pengeluaran untuk kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan per kapita per bulan.

Dari data ini yang dikategorikan penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluarannya ada di bawah garis kemiskinan. Indikator kemiskinan yang dihasilkan diantaranya adalah persentase penduduk miskin, yaitu persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan (yang disebut *Po/ Head Count Index*), jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*P1/ Poverty Gap Index*), Indeks Keparahan Kemiskinan (*P2/ Poverty Severity Index*). Data kemiskinan makro biasanya digunakan untuk *geographical targeting* dimana data yang dihasilkan menjawab berapa jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin secara agregat, serta menelaah sejauh mana kedalaman dan keparahan kemiskinan di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) (Kementrian

Sosial , 2012). Akan tetapi, data kemiskinan makro memiliki kelemahan yakni data kemiskinan makro yang telah dihasilkan hanya dapat disajikan sampai tingkat provinsi/kabupaten. Pendekatan kedua adalah kemiskinan mikro yang penghitungannya menggunakan pendekatan non moneter. Data mikro mampu menyediakan informasi mengenai penduduk miskin sampai dengan nama dan alamat penduduk miskin tersebut. Selain itu, jika pada data kemiskinan makro hanya mencakup penduduk miskin, sedangkan data kemiskinan mikro juga mencakup penduduk hampir miskin (*vulnerable*) yang hidup sedikit diatas garis kemiskinan.

Data kemiskinan mikro di Indonesia kini terangkum dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemeringkatan kesejahteraan dalam Basis Data Terpadu (BDT) dilakukan dengan metode statistik yang disebut **Proxy-Means Testing (PMT)**. Model PMT dibangun berdasarkan data makro yaitu SUSENAS yang secara statistik mencerminkan representasi karakteristik rumah tangga di setiap kabupaten/kota di Indonesia dan mengakomodasi perbedaan karakteristik tersebut. Setiap kabupaten/kota memiliki model tersendiri, karena satu variabel tertentu bisa jadi adalah penentu kesejahteraan di satu daerah namun bukan pembeda kesejahteraan di daerah lain (TNP2K, 2020). Data BDT ini kemudian yang menjadi acuan untuk penyaluran program-program kesejahteraan seperti misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), beras miskin (Raskin), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan lain-lain.

Tabel 3.1

Rekapitulasi Kemiskinan di Desa/Kelurahan Kota Denpasar Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2019

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH (RUMAH TANGGA)	
1	DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	183 DTKS	35 KPM
2		PADANGSAMBIAN KAJA	153 DTKS	16 KPM
3		PADANGSAMBIAN	517 DTKS	106 KPM
4		PEMECUTAN	358 DTKS	108 KPM
5		TEGAL KERTA	325 DTKS	98 KPM
6		DAUH PURI KANGIN	73 DTKS	20 KPM
7		DAUH PURI KLOD	122 DTKS	31 KPM
8		PADANGSAMBIAN KLOD	300 DTKS	29 KPM
9		PEMECUTAN KLOD	853 DTKS	167 KPM
10		DAUH PURI KAUH	355 DTKS	100 KPM
11		DAUH PURI	153 DTKS	23 KPM
JUMLAH			3392 DTKS	733 KPM

1	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAJA	352 DTKS	108 KPM
2		SUMERTA	133 DTKS	52 KPM
3		DANGIN PURI	217 DTKS	40 KPM
4		KESIMAN PETILAN	285 DTKS	56 KPM
5		KESIMAN	351 DTKS	99 KPM
6		PENATIH DANGIN PURI	194 DTKS	45 KPM
7		PENATIH	500 DTKS	54 KPM
8		DANGIN PURI KELOD	450 DTKS	70 KPM
9		KESIMAN KERTALANGU	579 DTKS	145 KPM
10		SUMERTA KAUH	89 DTKS	12 KPM
11		SUMERTA KELOD	336 DTKS	99 KPM
JUMLAH			3486 DTKS	780 KPM
1	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAJA	247 DTKS	82 KPM
2		DANGIN PURI KANGIN	158 DTKS	58 KPM
3		PEGUYANGAN KANGIN	408 DTKS	96 KPM
4		DAUH PURI KAJA	279 DTKS	103 KPM
5		PEGUYANGAN KAJA	312 DTKS	46 KPM
6		PEGUYANGAN	359 DTKS	71 KPM
7		TONJA	374 DTKS	104 KPM
8		UBUNG	138 DTKS	67 KPM
9		UBUNG KAJA	281 DTKS	71 KPM
10		PEMECUTAN KAJA	751 DTKS	343 KPM
11		DANGIN PURI KAUH	79 DTKS	25 KPM
JUMLAH			3386 DTKS	1066 KPM
1	DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	576 DTKS	89 KPM
2		PEDUNGAN	318 DTKS	73 KPM
3		RENON	197 DTKS	31 KPM
4		SANUR KAUH	91 DTKS	23 KPM
5		SESETAN	500 DTKS	101 KPM
6		SERANGAN	253 DTKS	53 KPM
7		PANJER	415 DTKS	72 KPM
8		SIDAKARYA	135 DTKS	41 KPM
9		SANUR	259 DTKS	45 KPM
10		SANUR KAJA	132 DTKS	15 KPM
JUMLAH			2876 DTKS	543 KPM

Pada tabel di atas ditunjukkan Data Kemiskinan semua desa dan kelurahan di Kota Denpasar Tahun 2019 berdasarkan BDT dengan jumlah rumah tangga sebanyak 13.140 rumah tangga dan 3122 KPM dari total empat kecamatan.

Data SUSENAS dan BDT pada dasarnya memang berbeda. Masing-masing data tersebut diperoleh dengan cara/metode yang berbeda untuk tujuan penggunaan yang juga berlainan satu sama lain. Perbandingan antara data kemiskinan makro dan kemiskina mikro secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Kemiskinan Makro dan Kemiskinan Mikro

Kemiskinan Makro	Kemiskinan Mikro
Sasaran Geografis	Sasaran Rumah Tangga
1. Metodologi <ul style="list-style-type: none"> Konsep : Pendekatan Kebutuhan Dasar (Penilaian Moneter) Berdasarkan pada Garis Kemiskinan (GK) <p>GK = GK Makanan + GK Non Makanan (Penting)</p>	1. Metodologi <ul style="list-style-type: none"> Bukan Penilaian Moneter Index multidimensional atau Proxy Means Test (PMT) dari karakteristik rumah tangga (Bukan Variabel Moneter) dilengkapi melalui sensus kemiskinan
2. Sumber data : Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS (Sampel) <ul style="list-style-type: none"> Sebelum 2010: Tahunan (□70.000 Rumah Tangga) 2011-Sekarang: Triwulanan (75.000 Rumah Tangga) 	2. Sumber data : Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
3. Data Kemiskinan : Kejadian kemiskinan untuk setiap daerah berdasarkan pada estimasi aggregate	3. Data kemiskinan : Rumah tangga miskin dan individu <i>by name</i> dan <i>by address</i>
4. Cakupan: Penduduk Miskin	4. Cakupan: Penduduk Miskin dan hampir Miskin
5. Keuntungan: <ul style="list-style-type: none"> □□Untuk sasaran geografis □□Untuk Indikator Kinerja Keterbatasan: Tidak dapat digunakan untuk sasaran individu	5. Keuntungan : <p>Untuk individu dan rumah tangga sasaran untuk Program perlindungan social</p> <p>Keterbatasan : Kesalahan Inklusi dan Eklusi</p>

Sumber: Kementerian Sosial Tahun 2012 dan hasil analisis.

Terkait dengan tujuan penyusunan RPKD ini, yakni untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Kota Denpasar serta untuk mempersiapkan RPJMD tahun 2021-2026, maka data yang lebih banyak digunakan dalam melakukan analisa kemiskinan adalah data makro yang diambil dari Susenas dan Sakernas serta data lain yang berasal dari BPS. Pengukuran data makro tersebut menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

3.2. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) maupun kebutuhan hidup minimum bukan makanan (perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya). Untuk pengeluaran makanan, nilai rupiah minimum yang dibutuhkan oleh seseorang dapat dikatakan hidup layak atau sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kilokalori per hari (BPS, 2020).

Agar seseorang dapat dikatakan hidup layak, pemenuhan akan kebutuhan makanan saja tidak cukup. Oleh karena itu perlu juga dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya. Batas kebutuhan minimum untuk makanan ditambah kebutuhan minimum untuk bukan makanan itulah yang disebut Garis Kemiskinan. Secara singkat, garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan dan jika pengeluarannya di bawah garis tersebut, maka yang bersangkutan akan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tabel 3.3

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Denpasar, 2015–2019

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	463,271	20.94	2.39
2016	483,821	19.17	2.15
2017	512,947	20.70	2.27
2018	545,357	20.72	2.24
2019	571,246	19.83	2.10

Sumber: BPS, Kota Denpasar Dalam Angka 2020

Dari tabel di atas, persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Angka tertinggi tercatat terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 2.39%

penduduk miskin di Kota Denpasar. Sementara data terakhir yaitu pada tahun 2019 persentase penduduk miskin telah mengalami penurunan sebesar 0.14% dari sebelumnya yang tercatat 2.24%.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 3.4

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Denpasar, 2015–2019

Tahun <i>Year</i>	Indeks Kedalaman Kemiskinan <i>Poverty Gap Index</i>	Indeks Keparahan Kemiskinan <i>Poverty Severity Index</i>
(1)	(2)	(3)
2015	0.24	0.04
2016	0.20	0.03
2017	0.40	0.12
2018	0.32	0.07
2019	0.29	0.06

Sumber: BPS, Kota Denpasar Dalam Angka 2020

Sama halnya dengan data penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Denpasar juga tercatat fluktuatif dari tahun 2015-2019. Angkat tertinggi sempat dicapai pada tahun 2015 yaitu dengan P1 sebesar 0.40 dan P2 0.12, dan mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.5
Indikator Kemiskinan Provinsi Bali 2019

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase penduduk miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kab/Bulan)
	Jembrana	13,55	4,88	0,59	0,11	390.102
	Tabanan	18,74	4,21	0,26	0,03	425.926
	Badung	11,89	1,78	0,16	0,03	547.186
	Gianyar	19,85	3,88	0,27	0,03	382.380
	Klungkung	9,66	5,40	0,62	0,13	312.864
	Bangli	10,08	4,44	0,24	0,02	329.014
	Karangasem	25,99	6,25	0,75	0,14	315.805
	Buleleng	34,26	5,19	0,72	0,14	401.377
	Kota Denpasar	19,83	2,10	0,29	0,06	571.246
	Bali	163,85	3,79	0,53	0,11	400.624

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2019

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Bali, Kota Denpasar adalah wilayah dengan presentase penduduk miskin terendah kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Badung. Presentase penduduk miskin di Kota Denpasar juga berada di bawah rata-rata presentase penduduk miskin di Provinsi Bali yang di tahun 2019 masih mencapai 3.79%.

Berdasarkan hasil pendataan Susenas 2019, Garis Kemiskinan di Denpasar mengalami kenaikan dari Rp 545.357 di bulan Maret 2018 menjadi Rp 571.246 di bulan Maret 2019. Jumlah penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin adalah 19.83 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 20.72 ribu jiwa. Dengan jumlah tersebut, presentase penduduk miskin di Kota Denpasar adalah 2.1% dari total jumlah populasi atau mengalami penurunan sekitar 0.14% dari tahun sebelumnya.

Dalam Susenas 2019, juga dihitung Indeks Kedalaman Kemiskinan/ *Poverty Gaps Index* (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan/ *Poverty Severity Index* (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan menghitung rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Di tahun 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Denpasar adalah

0.29, turun dari 0,32 di tahun 2018. Di sisi lain, Garis Kemiskinan di kota Denpasar meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin semakin bertambah setiap tahunnya yang secara langsung berarti semakin besar jumlah uang yang dibelanjakan oleh mereka.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dihitung dengan menjumlahkan *poverty gap* tertimbang yang penimbangnya sebanding dengan *poverty gap* itu sendiri. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Denpasar juga menunjukkan tren penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Di tahun 2019, nilai P2 di kota Denpasar mencapai 0,06, turun 0.01 poin dari tahun sebelumnya. Keadaan ini mencerminkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin rendah. Dengan kata lain sebaran penduduk miskin lebih homogen dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau ruang lingkup kondisi pengeluaran lebih sempit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.3. Hubungan Dimensi Pendidikan dan Kemiskinan

Pendidikan merupakan hal mendasar dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, bakat dan potensi yang ada pada manusia dapat bermanfaat untuk mengatasi persoalan kehidupan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena itulah pendidikan menjadi kunci penting dalam upaya pengentasan kemiskinan sebagai investasi untuk membawa kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam penelitian Hermanto & Dwi (2007) diketahui bahwa pendidikan mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan variable pembangunan lain seperti jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi.

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik kepada masing-masing individu maupun untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan. Pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti

menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Criswardani, 2005).

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Perusahaan cenderung lebih menghargai tenaga kerja dengan produktivitas tinggi yang pada akhirnya mempengaruhi gaji serta *reward* yang diberikan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya (Arsyad, 1999).

A. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) adalah lamanya tahun belajar yang diselesaikan dalam pendidikan formal dan tidak termasuk tahun yang mengulang. Pengukuran RLS dilakukan kepada penduduk yang berumur 25 tahun ke atas. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-rata lama sekolah di Kota Denpasar tiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah mencapai 10.96 tahun. Pada tahun-tahun berikutnya rata-rata ini mengalami peningkatan hingga mencapai 11.16 tahun pada tahun 2018. Akan tetapi masih terdapat perbedaan Rata- Rata Lama Sekolah menurut Gender. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki pada tahun 2018/2019 tercatat sebesar 11.61 tahun, sementara rata-rata lama sekolah penduduk perempuan hanya mencapai 10.83 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Perbedaan Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan gender ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki untuk menimba ilmu.

B. Tingkat Partisipasi Sekolah (APK dan APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.

Pada masing-masing jenjang pendidikan di kota Denpasar, nilai APM menunjukkan tren meningkat pada setiap tahunnya. Selain itu, pola yang sama juga terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, yang memperlihatkan semakin tinggi jenjang pendidikan maka besaran APM semakin rendah juga masih terjadi.

Tabel 3.6

Angka Partisipasi Murni Kota Denpasar

Kelompok Umur	2017	2018	2019
SD sederajat	95.08	93.20	94.5
SMP sederajat	75.06	77.19	76.94
SMA sederajat	64.24	63.47	64.42
PT sederajat	31.19	33.26	-

Sumber : BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2018/2019

Angka Partisipasi Murni (APM), merupakan beberapa indikator pendidikan yang menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari sudut pandang berbeda juga dapat diartikan sebagai kemampuan daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK dapat digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau

bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 3.7

Angka Partisipasi Kasar Kota Denpasar

Kelompok Umur	2017	2018	2019
SD sederajat	104.41	98.35	102.51
SMP sederajat	91.16	92.52	93.04
SMA sederajat	91.78	88.27	79.20
PT sederajat	41.84	43.30	43.34

Sumber : BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2018/2019

Dari kedua tabel diatas, dapat dilihat bahwa serapan pendidikan di tingkat SD adalah yang tertinggi. Akan tetapi, semakin tinggi jenjang pendidikannya terjadi pengurangan presentase serapan. Tingkat serapan terendah dapat dilihat di jenjang Perguruan Tinggi. Hal ini menandakan bahwa bagi sebagian besar penduduk, pendidikan di jenjang perguruan tinggi masih merupakan suatu kemewahan.

C. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dapat dicapai dengan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, meningkatnya tingkat pendidikan penduduk dapat menjadi gambaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Meskipun bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kemiskinan, namun hubungan antara tingkat pendidikan dengan kemiskinan sangat berpengaruh. Kemiskinan identik dengan ketidakmampuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi terutama karena faktor pembiayaan. Program pemerintah di bidang pendidikan, terutama pembebasan biaya sekolah di tingkat SD, telah banyak membantu masyarakat mengenyam pendidikan

dasar. Akan tetapi di jaman sekarang untuk bisa berkompetisi di dunia kerja dan mendapatkan penghidupan layak, diperlukan latar belakang pendidikan setidaknya setingkat SMA atau perguruan tinggi.

Berdasarkan data tahun 2019, diperkirakan bahwa 14.49% penduduk miskin di Kota Denpasar tidak menamatkan pendidikan tingkat SD. Sebagian besar, yakni 59.48% penduduk miskin hanya menamatkan pendidikan setingkat SD dan SMP. Sedangkan presentase jumlah penduduk miskin yang menamatkan pendidikan SMA atau lebih hanya mencapai 26.02%.

Tabel 3.8

Tingkat pendidikan bagi penduduk miskin di Kota Denpasar

Tingkat pendidikan	Presentase (Persen)
Tidak Tamat SD	14.49
Tamat SD/SMP	59.48
Tamat SMA+	26.02

Sumber : BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2018/2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk miskin di kota Denpasar (73.97%) tidak menamatkan pendidikan setingkat SMA. Astrini (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka keahlian juga meningkat sehingga akan mendorong produktivitas kerja. Pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung memiliki keterampilan dan wawasan yang kurang memadai untuk berkompetisi di bursa kerja sehingga sangat rentan mengalami pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin, dikarenakan keterbatasannya dalam mengenyam pendidikan, menjadi semakin dirugikan karena tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang bisa memberdayakan mereka dan membantu keluar dari jurang kemiskinan.

3.4. Hubungan Dimensi Ketenagakerjaan dan Kemiskinan

Permasalahan mengenai kesempatan kerja merupakan salah satu akar permasalahan kemiskinan. Menurut Feriyanto (2014) kesempatan kerja adalah jumlah lowongan tenaga kerja yang dapat ditampung oleh suatu lapangan kerja untuk menghasilkan output tertentu sedangkan kemampuan lapangan kerja menyerap jumlah tenaga kerja yang memenuhi kriteria pada lapangan kerja itu disebut penyerapan tenaga kerja. Diharapkan bahwa penduduk miskin dapat melepaskan diri dari jerat kemiskinan ketika kesempatan kerja meningkat.

Menurut Octaviani (2001), jumlah pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang (Sukirno, 2004). Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur situasi ketenagakerjaan diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tergolong sebagai angkatan kerja, atau dengan kata lain penduduk yang aktif secara ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 3.9
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Denpasar

Tahun	2017	2018	2019
TPAK	73.91	73.75	71.71

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2020

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja aktif (rata-rata laki-laki dan perempuan) dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Di tahun 2017, tercatat 73.91% penduduk Denpasar tergolong sebagai angkatan kerja, sedangkan sisanya bisa digolongkan sebagai penduduk bukan angkatan kerja. Di tahun 2018 presentase TPAK menurun menjadi 73.75%. Tren yang sama juga terlihat di tahun 2019 dimana angka angkatan kerja menurun menjadi 71.71%.

Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua penduduk yang ada dalam usia kerja dapat terserap. Untuk itu diperlukan indikator untuk melihat sejauh mana serapan angkatan kerja di suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja, namun tidak mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tabel 3.10
Tingkat Pengangguran Terbukan (TPT) Kota Denpasar

Tahun	2017	2018	2019
Tingkat pengangguran	2.63	1.82	2.22

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2020

Angka TPT Denpasar selama kurun waktu tahun 2017-2019 cenderung berfluktuasi. TPT Denpasar pada tahun 2017 sebesar 2,63 persen, kemudian turun menjadi 1,82 persen pada tahun 2018. Sayang sekali tren kembali naik di tahun 2019 dengan tingkat pengangguran mencapai 2.22%.

B. Status Pekerjaan

Sementara jika ditinjau menurut status pekerjaan, secara umum pilihan masyarakat untuk menjadi buruh/karyawan masih memiliki persentase tertinggi, yaitu sekitar 66-68 persen selama kurun waktu tahun 2017-2019. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu dominan sebagai buruh/karyawan. Pilihan kedua yang terbanyak adalah berusaha sendiri, yang persentasenya berkisar antara 10-13 persen dalam periode empat tahun terakhir.

Tabel 3.11

Status Pekerjaan Penduduk Kota Denpasar

Status Pekerjaan	2017			2018			2019		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Berusaha Sendiri	33,516	32,325	65,841	31,078	32,909	63,987	65,376	35,888	101,264
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	17,380	16,571	33,951	14,555	19,225	33,780	17,367	18,294	35,661
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	22,046	6,827	28,873	28,616	9,838	38,454	16,554	4,803	21,357
Buruh/Karyawan/Pegawai	196,054	135,723	331,777	212,754	135,425	348,179	190,149	127,262	317,411
Pekerja Bebas	7,726	2,936	10,662	1,829	2,580	4,409	6,232	3,638	9,870
Pekerja Keluarga/ tak dibayar	9,415	21,390	30,805	6,587	21,246	27,833	6,041	19,468	25,509

Sumber : BPS, Denpasar Dalam Angka 2018, 2019, 2020

Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa, dibandingkan penduduk laki-laki, jauh lebih banyak penduduk perempuan yang menjadi pekerja keluarga/tak dibayar. Hal ini terjadi karena jenis pekerjaan ini cenderung lebih fleksibel dan tidak terikat jam kerja. Selain itu masih pula terdapat persepsi di masyarakat bahwa perempuan adalah sumber penghasilan sekunder bagi rumah tangga yang juga turut berkontribusi pada kecenderungan ini.

3.5. Hubungan Dimensi Kesehatan dan Kemiskinan

Tingkat kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan mutu pembangunan suatu wilayah. SDM yang sehat akan mampu secara maksimal mendukung proses dan dinamika pembangunan suatu wilayah, khususnya pembangunan ekonominya. Korelasi antara kemiskinan dan kesehatan merupakan hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan (World Bank, 2002). Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menghabiskan tabungan rumah tangga sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan. Sebaliknya penduduk yang miskin memiliki kerentanan terkena permasalahan kesehatan, kekurangan gizi, dan kemampuan rendah untuk mengakses fasilitas kesehatan.

Berdasarkan teori mengenai lingkaran kemiskinan yang dikemukakan Myrdal (2000) bahwa semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai Angka Harapan Hidup (AHH) maka produktivitas akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Artinya semakin tinggi angka harapan hidup maka tingkat kemiskinan akan menurun.

A. Angka Harapan Hidup

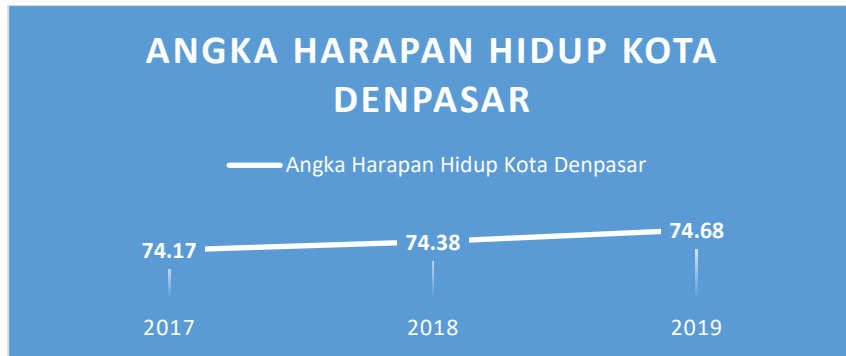
Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2019, AHH Kota Denpasar mencapai 74.68 tahun. AHH Kota Denpasar merupakan yang tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah

Kabupaten Badung (74.99 tahun). Angka ini lebih tinggi dari rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Bali yang hanya mencapai 71.99 tahun.

Grafik 3.1

Angka Harapan Hidup Kota Denpasar



Sumber : BPS Kota Denpasar, 2019

Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan menjadi hal yang wajib dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Tersedianya fasilitas kesehatan menjadi kunci penyampaian pelayanan kesehatan yang prima sehingga berdampak positif bagi peningkatan tingkat kesehatan masyarakat.

Untuk persebaran fasilitas kesehatan sendiri, masing-masing kecamatan di kota Denpasar sudah memiliki fasilitas kesehatan yang cukup lengkap. Kota Denpasar sendiri memiliki 12 Rumah Sakit, dimana angka ini adalah yang tertinggi untuk di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Demikian juga dengan fasilitas kesehatan lainnya seperti Rumah Sakit Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Apotek. Hal ini menandakan bahwa pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan di Kota Denpasar sudah cukup baik dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.12

Persebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Denpasar Tahun 2019

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Denpasar Selatan	1	0	8	4	6	8
Denpasar Timur	2	1	4	2	6	11

Denpasar Barat	4	2	6	2	7	11
Denpasar Utara	5	2	6	3	6	11
Total	12	5	24	11	25	41

Sumber : BPS, Kota Denpasar dalam Angka 2019

Kecenderungan untuk berobat tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi penduduk namun juga tidak terlepas dari akses terhadap berbagai fasilitas kesehatan termasuk ketersediaan jaminan kesehatan yang belakangan makin ditingkatkan seperti JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara) maupun JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tetapi tidak berobat jalan sebagian besar alasannya adalah karena mengobati sendiri. Secara keseluruhan poporsinya mencapai 68,93 persen di tahun 2018. Sebesar 27,44 persen merasa keluhan kesehatannya tidak perlu berobat jalan. Meskipun persentase nya kecil, akan tetapi masih terdapat penduduk yang tidak berobat jalan karena alasan tidak memiliki biaya untuk berobat yaitu sebesar 1,35 persen.

3.6. Hubungan Dimensi Infrastruktur dan Fasilitas Perumahan terhadap Kemiskinan

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat keefisienan dan keefektifan kegiatan ekonomi serta merupakan prasyarat agar berputarnya roda perekonomian berjalan dengan baik. Bahkan salah satu hal yang menyebabkan ketertinggalan suatu daerah dalam membangun ekonominya adalah rendahnya daya tarik suatu daerah dan sumber daya yang dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur, sehingga menyebabkan tingkat aktivitas ekonomi yang rendah. Salah satu aspek penting adalah infrastruktur fasilitas perumahan seperti listrik, air minum, dan sanitasi.

A. Air minum dan Sanitasi

Salah satu indikator rumah dikatakan layak adalah tersedianya air minum yang baik untuk dikonsumsi. Hingga kini persoalan pengaliran air masih terkendala oleh limbah, baik yang berasal dari industri maupun rumah tangga. Adanya limbah menyumbang pencemaran air terutama di kota-kota besar Indonesia. Jadi, akses terhadap kebutuhan air minum layak tidak serta merta hanya terjadi di daerah perdesaan saja. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di wilayah perkotaan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan infrastruktur penyediaan air akan menjadi penyebab sulitnya air bersih di perkotaan. Disamping itu, kebutuhan terhadap kuantitas dan kualitas air yang meningkat berpeluang besar menimbulkan pencemaran air akibat limbah. Apabila persoalan limbah ini tidak dikelola, air yang tercemar akan mengancam kesehatan penduduk karena menimbulkan berbagai macam penyakit.

Potensi sumber daya air di Kota Denpasar berasal dari air hujan, air permukaan, air tanah, serta air laut. Berdasarkan kondisi hidrologi, terdapat beberapa sumber daya air yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Kota Denpasar, yaitu : 1) aliran Sungai Tukad Ayung, 2) Tukad Badung, 3) Tukad Teba, 4) Tukad Mati, 5) Tukad Abian Base, 6) Tukad Loloan, 7) Tukad Oongan, 8) Tukad Ngenjung, 9) Penggawa, 10) Tukad Rangda/Buaji, 11) Tukad Pekaseh dan sumber aliran lainnya. Berikut ini potensi sumber daya air di Kota Denpasar.

Tabel 3.13.

Potensi Sumber Daya Air di Kota Denpasar

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Nama Bendungan/Dam		Total Bendungan/Dam (km)	Luas yang Dialiri (ha)
1.	Tukad Ayung	6,50	1	Kedewatan	1	720
			2	Mambal	1	645
			3	Peraupan	1	10
			4	Oongan	1	536
2.	Tukad Badung	17,15	5	Mertagangga	1	5
			6	Batan Nyuh	1	215
			7	Mergaya	1	100
			8	Gerak Tk. Badung	1	21
			9	Penyaring Sampah	1	0
			10	Waduk Muara	1	0
3.	Tukad Teba	8,75	11	Semila II	1	15

			12	Tegallinjung	1	0
4.	Tukad Mati	5,65	13	Free I. Tegallinjung	1	0
			14	Srogsogan	1	0
			15	Lange	1	25
			16	Dadas	1	15
			17	Umeduwi	1	25
5.	Tukad Abianse	4,15		-	-	-
6.	Tukad Loloan (DI. Oongan)	3,75	18	Emp. Bantang	1	15
			19	Emp. Bantang	1	8
			20	Emp. Pengabean	1	21
			21	Emp. Agel	1	36
			22	Emp. Pengayasan	1	23
			23	Penyaring Sampah	1	-
7.	Tukad Ngenjung	2,15		-	-	-
8.	Tukad Penggawa (DI. Oongan)	6,55	25	Emp. Sidakarya	1	97
9.	Tukad Rangda/Buaji (DI Oongan)	4,25			-	-
10.	Tukad Pekaseh (DI Oongan)	5,50	26	Emp. S. Sesetan	1	10
			28	Emp. S. Sesetan	1	15
Jumlah					25	2.557

Sumber: RKPD Kota Denpasar Tahun 2020

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia, sehingga sudah seharusnya kebutuhan air minum dapat terpenuhi. Indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan terhadap jumlah penduduk seluruhnya.

Tabel 3.14.

**Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak
Kota Denpasar Tahun 2014-2019**

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sambungan Rumah (jumlah rumah tangga berakses air minum)	Unit	77.052	80.356	82.353	83.470	85.136	86.290
Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jiwa	462.312	482.136	494.118	500.820	510.816	517.740
Jumlah penduduk	Jiwa	868.680	881.870	898.853	905.904	917.413	941.600
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	persen	53,22	54,67	54,97	55,28	55,68	54,98

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2020

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kota Denpasar dari tahun 2014 hingga 2018 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 53,22% menjadi 55,68%. Namun, pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 54,98%.

Indikator selanjutnya yang bermanfaat untuk mengukur kelayakan sanitasi adalah kepemilikan jamban. Persentase rumah tangga di Denpasar yang sudah memiliki jamban sendiri pada tahun 2018 sebesar 86,86 persen, sedikit menurun dibandingkan kondisi tahun 2017 yang sebesar 86,88 persen. Jamban yang memenuhi syarat kesehatan merupakan jamban yang pembuangan terakhirnya menggunakan leher angsa/tangki septik. Pada tahun 2018, persentase rumah tangga yang menggunakan jamban dengan leher angsa sebesar 98,39 persen. Sementara yang pembuangan terakhirnya menggunakan tangki septik/Spal sebesar 99,41 persen.

Fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) merupakan salah satu kebutuhan penting dalam rumah tinggal. Salah satu indikator rumah tinggal yang baik dan sehat adalah memiliki fasilitas sanitasi. Indikator persentase rumah tinggal bersanitasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rumah tinggal yang memiliki akses terhadap sanitasi dengan jumlah rumah tinggal. Data yang tersedia di Kota Denpasar untuk rumah tinggal bersanitasi adalah jumlah rumah tinggal yang tersambung dengan IPAL DSDP dan IPAL Komunal. Berikut tabel persentase rumah tinggal bersanitasi (IPAL) di Kota Denpasar tahun 2014-2019.

Tabel 3.15.

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Denpasar Tahun 2014-2019

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi IPAL terpusat skala Kota (DSDP)	Unit	7.922	8.346	8.500	8.500	9.479	9.554
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi IPAL terpusat skala Komunal (Sanimas)	Unit	770	827	827	827	827	827
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi IPAL DSDP dan Komunal	Unit	8.692	9.173	9.327	9.327	10.306	10.381
Jumlah rumah tinggal	Unit	144.780	146.978	149.808	150.984	152.902	156.933
Persentase rumah tinggal bersanitasi IPAL DSDP dan Komunal	Persen	6,00	6,24	6,22	6,18	6,74	6,61

Sumber : DPUPR Kota Denpasar Bid. AMPLP, 2020

Persentase rumah tinggal bersanitasi (IPAL DSDP dan Komunal) di Kota Denpasar pada kurun waktu enam tahun yaitu tahun 2014 hingga tahun

2019 secara umum mengalami peningkatan, dari 6% menjadi 6,61%. Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi (IPAL DPSP dan Komunal) setiap tahunnya mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2017 memiliki jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target Kota Denpasar, untuk persentase rumah tinggal bersanitasi dari tahun 2014 hingga 2019 sudah melebihi target. Meskipun demikian, sanitasi dalam rumah tinggal masih perlu diperhatikan karena dilihat dari nilai persentase rumah tinggal bersanitasi masih sangat kecil dan menandakan belum semua rumah tinggal bersanitasi.

IPAL Komunal (Sanimas) dilaksanakan terakhir di tahun 2015 dengan penambahan 50 unit di Tunggul Aji Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat. Pada tahun selanjutnya tidak dilanjutkan pembangunan IPAL Komunal Sanimas karena tidak tersedianya lahan, perilaku masyarakat yang menyalahgunakan fungsi Sanimas menjadi saluran pengendali banjir, dan sisa dana DAK tahun 2020 hanya untuk kegiatan pemeliharaan. Karena kondisi tersebut, maka tahun-tahun selanjutnya dana APBN/DAK untuk pembangunan fisik sanitasi difokuskan untuk pembangunan IPAL terpusat skala kota (DSDP).

B. Akses Listrik

Selain air bersih dan sanitasi layak, listrik memegang peranan penting dan mampu menggerakkan akses pelayanan dasar lain seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Listrik juga memberikan kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan. Adapun manfaat listrik untuk pembangunan diantaranya adalah memastikan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses terhadap sanitasi dan air bersih, memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan, memperbaiki kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjangan antar gender. Bahkan di era revolusi 4.0 ini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, semua tidak akan berjalan tanpa adanya listrik.

Salah satu indikator dalam penilaian perumahan layak huni adalah ketersediaan listrik dalam perumahan tersebut. Untuk mengetahui

ketersediaan listrik dalam rumah tangga, dilakukan penghitungan persentase rumah tangga pengguna listrik. Persentase rumah tangga pengguna listrik menunjukkan banyaknya penduduk (dalam satuan keluarga/kk) yang telah mendapatkan akses listrik. Berikut ini data yang menunjukkan bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Denpasar hampir mencapai 100%. Persentase rumah tangga pengguna listrik tidak mencapai 100% hanya terjadi pada tahun 2018 namun kembali meningkat menjadi 100% pada tahun 2019. Persentase rumah tangga pengguna listrik mencapai 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Denpasar sudah memiliki kualitas perumahan yang cukup baik.

Tabel 3.16.

Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Denpasar Tahun 2014-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	100	100	100	100	99,77	100

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2015-2019

Rasio ketersediaan listrik merupakan perhitungan dari rasio daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan listrik pada suatu kota/kabupaten. Tabel di bawah ini merupakan data yang tersedia di Kota Denpasar, yaitu data jumlah produksi listrik dan listrik yang terjual di Kota Denpasar.

Tabel 3.17.

Rasio Ketersediaan Daya Listrik Kota Denpasar Tahun 2014-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Produksi Listrik	kWh	1.329.929 .125	1.373.147 .507	1.514.462 .938	1.476.675 .849	1.522.364 .605	1.616.383 .670
2	Listrik yang terjual	kWh	1.235.989 .953	1.268.864 .416	1.407.428 .194	1.376.466 .318	1.423.518 .963	1.530.751 .866
3	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	%	107,6	108,2	107,6	107,3	106,9	105,6

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka Tahun 2015-2020

Produksi listrik di Kota Denpasar tahun 2014 sampai dengan 2019 selalu meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penjualan listrik di Kota Denpasar. Berdasarkan persentase tersebut, Kota Denpasar telah memenuhi kebutuhan listrik karena jumlah produksi melebihi jumlah penjualan

listrik di Kota Denpasar. Dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Denpasar masih perlu menyediakan sumber energi cadangan sehingga kinerja ketersediaan daya listrik dapat lebih optimal.

3.7. Hubungan Dimensi Belanja Daerah dan Kemiskinan

Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan, sesuai dengan peranan pemerintah yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Peranan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan ingin terselesaikan. Anggaran yang dikeluarkan melalui belanja untuk pengentasan kemiskinan menjadi stimulus dalam menurunkan angka kemiskinan dan beberapa persoalan pembangunan yang lain. Artinya semakin tinggi jumlah anggaran pendapatan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu anggaran yang dimaksud dialokasikan guna membuat program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Alokasi anggaran yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk program pengentasan kemiskinan .dapat menjadi pijakan untuk melihat komitmen pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Kota Denpasar melalui OPD telah mencoba melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Denpasar. Melihat tabel dibawah, terdapat beberapa OPD yang telah melakukan beberapa kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Denpasar OPD.

Tabel 3.18

Program Perangkat Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan

No	Perangkat Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2017		2018		2019	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	103,26	38.969,28	103,31	42.608,67	103,36	43.886,93
			APS SD/MI	97,9	-	97,95	-	98	-
			APK SMP/MTs	102,06	-	102,11	-	102,16	-
			APS SMP/MTs	99,07	-	99,09	-	99,11	-
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar	91	-	92	-	93	-
2	Dinas Kesehatan	Program pelayanan penduduk miskin	Presentase penduduk miskin penderita katarak yang dioperasi katarak	100%	3,60	100%	59,20	100%	60,20

3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Program pengembangan perumahan	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	30 unit	2.406,60	50 unit	2.818,57	50 unit	2.903,13
		Program lingkungan sehat perumahan	Persentase penurunan luasan pemukiman kumuh	1,65%	176,12	20%	928,34	20%	956,19
4	Dinas Sosial	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Jumlah KUBE yang meningkat hasil usahanya	31 KUBE	232,52	31 KUBE	283,52	35 KUBE	297,70
		Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jumlah anggota TAGANA yang meningkat kemampuan	30 TAGANA	518,18	30 TAGANA	623,99	15 TAGANA	624,30
5	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tersalurnya tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	25%	163,22	25%	480,63	25%	504,66
6	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi usaha kecil	0,50%	561,00	0,50%	1.268,00	0.50%	1.394,80

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat enam OPD di Kota Denpasar yang telah melakukan program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Denpasar baik secara langsung ataupun berdampak. Dimaksudkan berdampak yakni dampak dari program tidak secara langsung dapat terlihat untuk mengentaskan kemiskinan. Namun program tersebut akan berdampak pada pengentasan kemiskinan.

Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar memiliki dua program yang berdampak pada pengentasan kemiskinan yakni Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Dimana *outcome* dari kedua program ini yakni peningkatan jumlah anak-anak yang menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dan persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah pintar. Kedua program ini dikatakan berdampak pada pengentasan kemiskinan karena semakin meningkat jumlah anak-anak yang menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, semakin meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, yang kemudian dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Sedangkan Dinas Kesehatan Kota Denpasar memiliki program pelayanan penduduk miskin dengan *outcome* presentase penduduk miskin penderita katarak yang dioperasi katarak.

Program OPD lainnya yang juga berdampak pada pengentasan kemiskinan yakni Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dengan programnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja yang *outcomenya* tersalurnya tenaga kerja yang mengikuti pelatihan. Program ini dikatakan berdampak karena dengan adanya peningkatan kualitas dan produktifitas seseorang akan mempermudah orang tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga secara otomatis juga akan meningkatkan kualitas hidup. Begitupun dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah. Dimana sasaran *outcome* yang diinginkan dari program ini ialah usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi usaha kecil. Program ini mendorong meningkatnya usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat dari usaha mikro menjadi usaha kecil. Dengan meningkatnya tingkat usaha masyarakat, pemerintah mengharapkan masyarakat memperoleh peningkatan produktifitas dan keuntungan secara pribadi.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

4.1 Arah Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sedangkan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan pejabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok program sebagai berikut :

- a. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Masing-masing kelompok program penanggulangan kemiskinan tersebut diatas memiliki karakteristik kegiatan program yang berbeda-beda yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Kelompok Program Penanggulangan kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat

pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih.

b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai karakteristik :

- ↳ Pendekatan partisipasi berdasarkan kebutuhan masyarakat
- ↳ Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
- ↳ Pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok

Perencanaan program dilakukan secara berpartisipatif, terbuka, dengan prinsip dari oleh untuk masyarakat serta hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai karakteristik :

- ↳ Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro
- ↳ Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar
- ↳ Meningkatkan ketrampilan dan manajemen usaha

Sebagai implementasi Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Pemerintah Kota Denpasar ke depan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan mengacu pada 3 (tiga) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan diatas dengan *leading* sektornya Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar, dan kelompok program lainnya yang berbasis peningkatan kapasitas dan peningkatan sumberdaya manusia untuk penciptaan lapangan kerja dan ketersediaan tenaga kerja, dengan *leading* sektornya adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang meliputi :

1. Program Pro Rakyat :

- Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga
- Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat
- Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan UMK

2. Program Keadilan Untuk Semua :

- Program Keadilan bagi anak
- Program Keadilan Bagi Perempuan
- Program Keadilan di Bidang Ketenagakerjaan
- Program Keadilan bidang bantuan hukum
- Program Keadilan Bidang reformasi hukum dan peradilan
- Program Keadilan Bagi Kelompok miskin dan terpinggirkan

3. Program Pencapaian MDGs :

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan komitmen nasional dan global dalam upaya lebih mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. 8 (delapan) tujuan (*goals*) menjadi komitmen MDGs mencakup: (1) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan; (2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua; (3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (4) Menurunkan Angka Kematian Anak; (5) Meningkatkan Kesehatan Ibu; (6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya; (7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup; dan (8) Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sejalan dengan rencana pembangunan nasional, pengarusutamaan MDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan di tingkat daerah. Pengarusutamaan MDGs dalam pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah. Untuk mendukung percepatan pencapaian MDGs secara nasional, maka diharapkan daerah memberikan kontribusi untuk meringankan beban pemerintah pusat untuk pencapaian target MDGs. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Denpasar merencanakan penyusunan peta jalan pencapaian target MDGs untuk memberikan sumbangsih secara nasional. Arah kebijakan untuk mencapai target MDGs sebagai berikut :

1. Mengurangi besarnya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, melalui:

a. Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha.

Upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan usaha.

1) Kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja.

Kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat miskin dan mampu menjamin penghasilan yang tetap. Selain itu juga mendorong masyarakat miskin untuk belajar berusaha secara mandiri melalui kelompok, sehingga mampu mewujudkan jiwa kewirausahaan.

a) Peningkatan kesempatan kerja masyarakat miskin.

Upaya peningkatan kesempatan kerja dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja produktif dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan dilakukan secara mandiri.

b) Peningkatan akses permodalan bagi masyarakat miskin.

Peningkatan akses permodalan dilakukan dengan membangun kemitraan bersama koperasi, instansi terkait, lembaga keuangan dan BUMN/BUMD. Selain itu dilakukan pula pendampingan pengelolaan manajerial dan pemasaran.

c) Pengembangan usaha.

Pengembangan usaha dilakukan melalui pengembangan budaya usaha dan pelatihan kewirausahaan.

2) Kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja antara lain:

a) Pengembangan kewirausahaan.

Upaya ini dilakukan dengan penguatan kelembagaan dan kemampuan manajemen usaha.

b) Peningkatan kapasitas kerja masyarakat miskin.

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas, kompetensi, kemampuan manajemen dan penerapan teknologi tepat guna.

3) Kebijakan untuk meningkatkan usaha produktif bagi masyarakat miskin, meliputi:

a) Pengembangan usaha pada masyarakat miskin.

Pengembangan usaha dilakukan melalui pendampingan kegiatan usaha, peningkatan perlindungan usaha dan disertai pembentukan serta pengembangan sentra-sentra usaha.

b) Pengembangan Peningkatan akses sumberdaya produktif bagi kelompok masyarakat miskin.

Peningkatan akses sumberdaya produktif dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dengan penggunaan teknologi tepat guna, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kegiatan usaha.

b. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah.

Pengurangan kesenjangan antar wilayah dilakukan melalui berbagai langkah yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah pesisir dan wilayah pasca bencana antara lain meliputi:

- 1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar di wilayah pesisir dan pasca bencana;
- 2) Peningkatan investasi dan pengembangan usaha di wilayah pesisir dan pasca bencana;
- 3) Revitalisasi kebijakan penataan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;
- 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di wilayah pesisir, dan pasca bencana;
- 5) Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah dalam rangka pengembangan potensi daerah.

c. Pemenuhan Hak Dasar.

Upaya pemenuhan hak dasar dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumberdaya alam, rasa aman dan partisipasi masyarakat , antara lain meliputi :

- 1) Pemenuhan kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau serta meningkatkan gizi masyarakat .

- 2) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan rentan.
- 3) Peningkatan pendidikan masyarakat, baik pendidikan formal dan non formal.
- 4) Peningkatan penyediaan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.
- 5) Penyediaan tempat tinggal atau perumahan yang layak dan permukiman yang sehat.
- 6) Peningkatan ketersediaan air bersih yang aman dan sanitasi dasar yang baik.
- 7) Peningkatan penjaminan dan perlindungan hak perorangan dan hak komunal atas tanah.
- 8) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- 9) Peningkatan perlindungan dan ketenteraman dalam masyarakat.
- 10) Memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan.

d. Percepatan Pembangunan.

Upaya percepatan pembangunan perdesaan dilakukan dengan mengarahkan kembali orientasi pembangunan ke pedesaan yang bersifat menyeluruh, terkait pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan, sosial budaya, politik dan kewilayahan. Segenap potensi masyarakat Kota Denpasar, baik pengetahuan, keterampilan, teknologi dan informasi serta permodalan diarahkan untuk mendukung pembangunan perdesaan secara terpadu. Hal tersebut sejalan dengan gerakan pembangunan perdesaan yang kesemuanya ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dilakukan dalam bentuk :

- 1) Revitalisasi pertanian dalam arti luas dalam bentuk reorientasi pengelolaan usaha tani, peningkatan akses petani dan nelayan terhadap modal, sarana dan prasarana, teknologi dan pasar.
- 2) Peningkatan dan perbaikan infrastruktur perdesaan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin dan menarik investor mengembangkan usaha.

- 3) Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan modal sosial (*social capital*).
- 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dan kelembagaan di perdesaan.
- 5) Menciptakan iklim yang kondusif, agar kegiatan usaha dapat tumbuh berkembang dan mandiri di wilayah perdesaan.
- 6) Menjamin kestabilan ketersediaan pangan.
- 7) Menjamin kepastian harga komoditas pertanian dan perlindungan pasar, agar menguntungkan bagi petani.

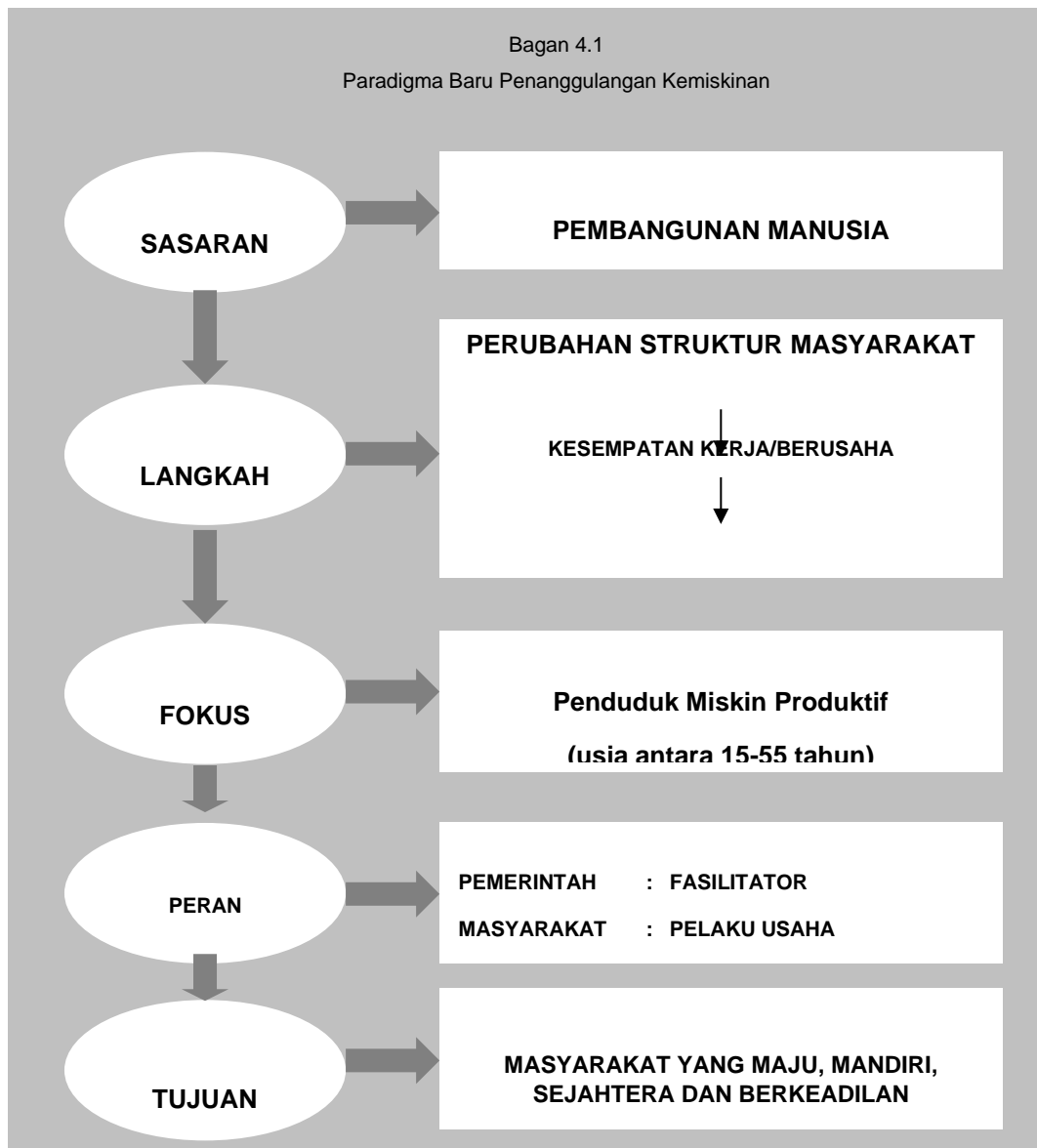
Kebijakan yang ditempuh untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, antara lain berupa:

- a. Penajaman prioritas program dan sasaran untuk kelompok masyarakat sangat miskin;
- b. Peningkatan bantuan perlindungan sosial bagi kelompok miskin;
- c. Peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin dan lembaga desa/kelurahan dalam melaksanakan pembangunan.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di tingkat desa/kelurahan;
- e. Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem informasi yang menunjang pemberdayaan masyarakat.
- f. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan;
- g. Peningkatan kemampuan manajemen keuangan desa/kelurahan;
- h. Peningkatan jumlah anggaran bagi penduduk miskin yang dikelola desa/kelurahan;
- i. Peningkatan pengawasan pelaksanaan penggunaan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

4.2 Paradigma Baru Penanggulangan Kemiskinan

Saat ini secara substansial telah terjadi perubahan terhadap paradigma penanggulangan kemiskinan, yaitu menjadi suatu gerakan nasional yang dilakukan oleh masyarakat dengan subyek sasaran pada aspek manusianya, kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat miskin potensial produktif dan proses pelaksanaan

kegiatan dilakukan secara mandiri oleh kelompok masyarakat miskin dalam wadah kelompok masyarakat (pokmas) dengan menggunakan mekanisme musyawarah mufakat. Kegiatan tersebut berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung (lihat bagan 4.1).



Paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan adalah berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata, partisipatif, demokratis mekanisme pasar, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman. Berdasarkan prinsip-prinsip dalam paradigma baru tersebut, kini pendekatan yang perlu digunakan dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah sebagai fasilitator dan motivator dalam pembangunan. Selain itu pendampingan kepada kelompok

masyarakat miskin dengan berbagai kegiatan yang dilakukannya sangat diperlukan. Bentuk pendampingan tersebut berupa fasilitasi, mediasi, dan advokasi yang sebaiknya dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat setempat. Peran pemerintah lebih bersifat sebagai fasilitator guna melakukan penciptaan kondisi yang kondusif bagi proses kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan langkah intervensi pemerintah terhadap kelompok masyarakat miskin produktif potensial untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat miskin beserta kelembagaannya (*capacity building dan institution building*) dalam pengelolaan sumber-sumber daya, dengan pendekatan "community based development" menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

4.3 Isu-Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan

Isu-isu strategis penanggulangan kemiskinan saat ini ada beberapa faktor diantaranya :

a. Keterbatasan Kesempatan

Isu ini berkaitan dengan iklim dan lingkungan eksternal masyarakat miskin yang kurang kondusif bagi mereka untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Hal ini diindikasikan dari sisi ekonomi makro yang belum berorientasi pada *pro-poor growth*, tata pemerintahan pada sektor publik dan swasta yang belum mantap, serta belum merata dan adilnya penyediaan pelayanan publik, khususnya pendidikan, kesehatan dan prasarana sarana dasar bagi masyarakat miskin.

b. Ketidakberdayaan

Rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat miskin merupakan akibat dari pendekatan pembangunan masa lalu yang bersifat sentralistik dan *top down*, sehingga melemahkan kemampuan kelembagaan khususnya kelompok masyarakat miskin dan marjinal, sehingga dalam berbagai proses pengambilan keputusan kebijakan publik mereka terabaikan.

c. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor yang mempengaruhi kualitas SDM masyarakat miskin adalah rendahnya tingkat pendidikan, derajat kesehatan yang buruk, akses informasi dan teknologi yang lemah, kemampuan manajemen dan produksi serta pemasaran yang lemah, pola mata pencaharian yang tidak konsisten.

Rendahnya sumber daya masyarakat ini bermuara pada rendahnya partisipasi dalam berbagai aspek.

d. Lemahnya Perlindungan Sosial

Isu perlindungan sosial merupakan keadaan yang relatif mudah ditemui di kalangan masyarakat miskin seperti: faktor bencana alam, konflik sosial yang sering terjadi belakangan ini menyebabkan semakin tidak berdayanya masyarakat miskin dalam perlindungan sosial secara mandiri. Disisi lain, terdapat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menangani perlindungan sosial terutama kepada golongan masyarakat miskin.

e. Pandemi Covid-19

Kejadian luar biasa pandemi covid-19 pada tahun 2020 membawa dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Adanya kejadian ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyiapkan instrumen kebijakan yang tepat dan juga mendorong masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Adapun kebijakan tersebut mencakup kebijakan dari pusat, provinsi Bali, pemerintah Kota Denpasar, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa maupun kelurahan

4.4 Sasaran dan Fokus Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran dan fokus penanggulangan kemiskinan sebagai berikut :

- a. Sasaran penanggulangan kemiskinan di Kota Denpasar diarahkan pada :
 - Pemberdayaan masyarakat miskin dengan membentuk kelompok dan pemberian motivasi serta bantuan langsung pada kelompok sasaran.
 - Pemberian advokasi berupa tenaga pendamping dari perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat maupun konsultan.
 - Memprioritaskan bantuan program pada masyarakat miskin yang terkena langsung dampak krisis ekonomi.
 - Pengembangan sentra-sentra industri pendukung pariwisata sehingga masyarakat dapat berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor pariwisata sesuai potensi yang ada.
- b. Berdasarkan strategi pendekatan penanggulangan kemiskinan, yaitu peningkatan produktivitas dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, maka sasaran penanggulangan kemiskinan berdasarkan kelompok usia adalah :

- Kelompok usia belum produktif (umur < 15 tahun).
- Kelompok usia produktif (umur 15 – 55 tahun).
- Kelompok usia tidak produktif (umur > 55 tahun).

Sasaran penanggulangan kemiskinan harus difokuskan kepada kelompok masyarakat miskin potensial produktif (kelompok usia produktif) melalui strategi pendekatan peningkatan produktivitas, sedangkan strategi pendekatan pengurangan beban pengeluaran difokuskan pada masyarakat miskin kelompok usia belum produktif dan tidak produktif.

4.5 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan ditempuh dengan strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, yang diupayakan melalui 2 (dua) strategi pendekatan, yaitu :

- a. Meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui peningkatan produktivitas, dimana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan pemihakan, kemudahan memperoleh aksesibilitas terhadap pembiayaan usaha ekonomi produktif skala mikro.
- b. Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana sarana lingkungan yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi.

4.6 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam penanggulangan kemiskinan diarahkan pada dimensi pokok kemiskinan, yaitu (1) kurangnya budaya untuk maju (mental) dan kesempatan; (2) rendahnya kemandirian dan kemampuan; (3) rendahnya sumberdaya masyarakat dan partisipasi; dan (4) lemahnya jaminan atau perlindungan sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Pola Kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu :

- a. Kebijakan peningkatan budaya dan etos kerja keras dan perubahan sikap mental ke arah yang lebih maju, sikap jengah dan malu menjadi miskin.
- b. Kebijakan perluasan kesempatan (*promoting opportunity*), yakni pemerintah bersama sektor swasta dan masyarakat menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

- c. Kebijakan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat memberdayakan masyarakat miskin dalam arti memandirikan dan memampukan, agar dapat memperoleh kembali hak-hak ekonomi, sosial dan politik, mengontrol keputusan yang menyangkut kepentingannya, menyalurkan aspirasi, mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri.
- d. Kebijakan pengembangan kapasitas (*capacity building*), yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat miskin dan penguatan kelembagaannya agar mampu berpartisipasi dalam semua aspek, mengambil prakarsa bagi kemajuan mereka sendiri, mampu bekerja dan berusaha secara lebih produktif untuk memenuhi kebutuhannya, serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
- e. Kebijakan perlindungan sosial (*social protection*), yakni pemerintah melalui kebijakan publik mengajak sektor swasta dan masyarakat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin (seperti : orang jompo, anak terlantar, cacat) dan kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif dari krisis ekonomi dan konflik sosial.

Berdasarkan strategi dasar, dua strategi pendekatan, dan empat pola kebijakan tersebut, maka dirumuskan tujuh kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu :

1. Penguatan jati diri masyarakat berbasis budaya dan kearifan lokal.

Dalam upaya meningkatkan jati diri masyarakat berbasis budaya Bali dan kearifan lokal sebagai jalan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Kota Denpasar dapat dilaksanakan melalui peningkatan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan beragama, peran serta lembaga sosial keagamaan dan terciptanya harmoni sosial yang kondusif.

Dari hasil survey yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor kemiskinan lebih banyak disebabkan karena faktor budaya, khususnya budaya malas, mental yang selalu bergantung dan tidak mau maju.

2. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat memiliki dua aspek pokok, yaitu: (1) meningkatkan KEMAMPUAN masyarakat (*to give ability or enable*) melalui pelaksanaan berbagai Program dan Kegiatan pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, dan (2) meningkatkan KEMANDIRIAN masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan (*to give authority*) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Hal itu menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti MEMAMPUKAN dan MEMANDIRIKAN masyarakat.

Adapun etika dalam menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat adalah : (a) memahami dan tanggap (*responsif*) terhadap aspirasi masyarakat dalam melaksanakan berbagai program/kegiatan; (b) membangun budaya kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhannya secara mandiri; (c) melakukan dialog dan memberikan informasi yang tepat dan terbaik bagi masyarakat; dan (d) menciptakan kebijakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berpihak kepada yang lemah. Adapun langkah – langkah yang dilakukan meliputi : (1) Memberikan pemahaman budaya hidup yang maju melalui tokoh-tokoh agama dan masyarakat, pemungkinan (*enabling*), menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal; (2) Penguatan (*empowering*), memperkuat pengetahuan, kemampuan, dan jaringan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya; (3) Perlindungan (*protecting*), melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang; (4) Penyokongan (*supporting*), memberikan dukungan dan bimbingan agar orang mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya; (5) Pemeliharaan (*fostering*), memelihara, menjaga, merawat kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi antar berbagai kelompok dalam masyarakat.

3. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Penduduk Miskin melalui Kegiatan Produktif

Langkah-langkah yang dilaksanakan adalah :

- a. Penciptaan dan perluasan kesempatan berusaha bagi keluarga miskin, membuka peluang pasar menjadi lebih terbuka bagi hasil produksi kelompok masyarakat miskin.
- b. Penguatan ekonomi keluarga, kegiatan-kegiatan ekonomi dalam keluarga yang semula bersifat pemenuhan kebutuhan sendiri, ditingkatkan menjadi kegiatan produktif yang lebih berskala ekonomi dan berorientasi pada pasar.
- c. Pemberdayaan masyarakat miskin, upaya-upaya yang dilakukan mencakup pemberdayaan manusianya, pemberdayaan usahanya dan pemberdayaan lingkungannya.

4. Kebijakan Pengurangan Beban Pengeluaran Penduduk Miskin

Kebijakan ini mencakup 3 hal utama yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

(1) Di bidang pendidikan :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Revitalisasi sekolah-sekolah agar menjadi lebih efektif dan efisien.
- c. Penerapan alternatif pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan formal maupun pendidikan non formal atau luar sekolah (melalui kejar paket A dan paket B).
- d. Pusat latihan ketrampilan terutama di daerah-daerah kantong kemiskinan yang diharapkan akan memberi perubahan pada pola hidup dan kemampuan masyarakat miskin untuk menghadapi berbagai masalah kehidupannya.

(2) Di bidang kesehatan: antara lain, pelayanan kesehatan ibu dan anak, subsidi biaya kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan orang lanjut usia/jompo, penyehatan sanitasi lingkungan, penyuluhan kesehatan.

(3) Di bidang infrastruktur, diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti: pengadaan air bersih, sanitasi lingkungan, sarana transportasi, sarana pemasaran, serta peningkatan akses informasi pasar.

5. Kebijakan Makro Ekonomi yang Berpihak pada Orang Miskin.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada masa lalu memperlihatkan beberapa kelemahan antara lain: (a) lebih berorientasi pada pertumbuhan daripada pemerataan; (b) sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi kebijakan; (c) memposisikan masyarakat sebagai objek daripada subjek; dan (d) asumsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama (seragam) daripada pluralistik.

Atas dasar kelemahan kebijakan tersebut, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Dari sentralisasi ke desentralisasi, perubahan ini memungkinkan terjadinya masyarakat lebih dekat dan lebih langsung terhadap program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah dan disinergikan dengan program yang dikembangkan melalui partisipasi masyarakat.
- b. Dari sistem komando dan kontrol ke partisipasi masyarakat, selain itu dalam rangka mendorong terbentuknya partisipasi masyarakat yang lebih besar akan dilakukan penciptaan kepemilikan program oleh masyarakat itu sendiri.
- c. Peran pemerintah lebih sebagai “pendamping”. Pendekatan tersebut menuntut satu perubahan paradigma tentang peran penanganan program secara langsung oleh pemerintah yang diubah menuju peran yang bersifat fasilitasi, katalisasi maupun mediasi bagi antar pelaku pembangunan.

Melalui ke-tiga pendekatan tersebut, tidak berarti bahwa peran pemerintah menjadi berkurang, walaupun pemerintah bukan lagi sebagai pelaksana utama melainkan lebih berperan sebagai penggerak. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pelaksana program adalah masyarakat itu sendiri. Melalui pergeseran paradigma seperti itu, adalah sangat strategis apabila kemudian dapat dibangun kemitraan antara pemerintah dengan seluruh komponen *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan seperti pihak swasta, LSM, dan komunitas lainnya.

6. Kebijakan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak untuk Menghapus Pewarisan Kemiskinan

Perempuan dan anak-anak sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat merupakan pihak yang senantiasa menjadi korban dari kemiskinan. Untuk itulah peningkatan pemberdayaan perempuan dan hak-hak anak perlu mendapatkan perhatian yang utama dalam penanggulangan kemiskinan.

Upaya – upaya yang dapat dilakukan adalah :

- a. Memperluas kesempatan bagi perempuan dengan meningkatkan aset produktifnya, dengan cara antara lain : (1) memberi prioritas investasi untuk meningkatkan ekonomi keluarga secara terarah; (2) meningkatkan akses perempuan miskin ke aset produktif seperti tanah, finansial, informasi dan pelayanan keuangan lainnya.
- b. Meningkatkan kemampuan perempuan dengan meningkatkan aset modal manusia (*human capital assets*), meliputi : (1) memberikan prioritas investasi dalam pendidikan dasar dengan penekanan pada partisipasi anak perempuan; (2) memberikan prioritas investasi pada pelayanan kesehatan dasar dengan penekanan pada peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan produktif;
- c. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan mengikut sertakan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga dan masyarakat, antara lain melalui: (1) peningkatan komitmen semua pihak pada kesetaraan gender; (2) peningkatan kapasitas perempuan melalui program belajar baik formal maupun non formal.

7. Kebijakan Perlindungan Sosial

Kebijakan ini diarahkan kepada masyarakat yang tidak memiliki sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara layak. Di samping itu ditujukan pula kepada anggota masyarakat yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak, serta kepada kelompok masyarakat yang fungsi sosialnya tidak dapat dikembangkan lagi karena tidak adanya potensi dalam dirinya ataupun kalau bisa hanya dapat dikembangkan sampai batas tertentu.

Kepada kelompok miskin seperti tersebut diberikan bantuan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial, dengan tujuan :

- a. Membantu penduduk miskin yang fungsi keluarganya tidak dapat dikembangkan lagi untuk dapat menggunakan atau menjangkau fasilitas pelayanan umum (sarana kesehatan, pendidikan, transportasi, rekreasi, dll).
- b. Membantu penduduk miskin yang tidak mempunyai perlindungan masa depan jika mereka mengalami kecelakaan dan berusia lanjut.

4.7 Prioritas Program Berdasarkan Klaster

Dengan melihat determinasi kemiskinan Kota Denpasar, analisa APBD dan Isu Isu Strategis Pembangunan Daerah, berikut ini disusun Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Denpasar, yang disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan

NO	KLASTER	PROGRAM	TUJUAN	OPD Pelaksana
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatkan APK dan APS serta sarana pembelajaran pada rumah pintar	Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Memberikan keringanan biaya dan kemudahan layanan kepada kelompok masyarakat miskin	Dinas Kesehatan
3	Perumahan	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman	Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
4	Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatkan hasil usaha kelompok usaha bersama dan meningkatkan kemampuan TAGANA	Dinas Sosial
5	Ketenaga-kerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan relevansi keterampilan tenaga kerja dengan lapangan kerja serta penyaluran tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
6	UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha	Meningkatkan daya saing dan status	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan

		Mikro (UMKM)	usaha	Menengah
7	PMKS	Program Rehabilitasi Sosial	Penurunan jumlah PMKS melalui kebijakan penanganan PMKS terintegrasi	Dinas Sosial , Bagian Kesra dan pendampingan K3S
8	Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan	Bappeda dan Dinas Sosial melibatkan peran komunitas sosial dan kelompok rentan
9	Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Mengembangkan kemampuan kelompok sasaran dan menyediakan akses informasi	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinkominfo dengan pelibatan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
10	Koordinasi Kelembagaan	Penguatan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyusunan Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu	Tersedianya program prioritas penanggulangan kemiskinan terpadu	Bappeda, Dinas Sosial dan OPD Terkait
11	Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tersedianya kebutuhan pangan masyarakat untuk mengantisipasi dampak kejadian luar biasa	Dinas Ketahanan Pangan

Untuk mewujudkan program program diatas, penting untuk memperhatikan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin. Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi

penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan. Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital). Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya. Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marginalisasi, baik secara fisik maupun sosial. Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan. Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik.

Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program secara terkoordinasi dalam arti diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Strategi dilakukan dengan:

- a) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Program terdiri atas:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. program - program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

4.8 Pembagian Peran Pelaku Pembangunan Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pelaku pembangunan yaitu pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat mempunyai kedudukan yang setara dalam penanggulangan kemiskinan, namun harus ada pembagian peran yang jelas didasari atas pemikiran yang sama dan saling mendukung dalam proses mempercepat menanggulangi kemiskinan.

a. Peran Pemerintah Daerah.

Peran pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut diantaranya adalah memahami aspirasi masyarakat, memberikan peluang kepada masyarakat guna melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri, menciptakan instrumen dalam bentuk peraturan perundangan yang dapat menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi masyarakat miskin. Pemerintah juga berkewajiban membuka akses masyarakat terhadap informasi sumber-sumber daya pembangunan terutama penyediaan modal dan informasi pasar.

b. Peran Masyarakat.

Peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam penanggulangan kemiskinan adalah melakukan advokasi, asistensi dan pendampingan serta kontrol sosial dalam memberikan respon terhadap kemudahan-kemudahan yang diberikan

oleh pemerintah dengan semangat memperbaiki tarap kehidupan yang lebih layak.

c. Swasta / Dunia Usaha.

Sektor swasta / dunia usaha mempunyai peran secara langsung melalui kemitraan usaha yang berbasis pada keterkaitan usaha sehingga terjadi proses pembelajaran. Selain itu bagi sektor swasta yang bersifat padat karya dapat menggunakan tenaga kerja lokal maupun input pendukung usaha yang mendorong keberdayaan masyarakat. Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya, peran yang dilakukan adalah dengan memberikan penguatan usaha melalui penyediaan dana, bantuan teknis dan pendampingan serta aspek penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelembagaan penjamin kredit. Peran pihak swasta secara tidak langsung oleh pihak swasta dapat dilakukan melalui proses produksi yang ramah lingkungan.

4.9 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dan Partisipatif

Guna lebih meningkatkan dan mewujudkan upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini perlu dilakukan langkah-langkah yang sistematis dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara lebih terukur dan terpadu menyangkut pertanyaan-pertanyaan ; (1) siapa berbuat apa, (2) bilamana, (3) dimana, (4) bagaimana, dan (5) berapa sumber daya yang dibutuhkan. Dikaitkan dengan upaya untuk mewujudkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan, pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang bersifat terukur, jelas dan terinci berkaitan dengan parameter-parameter program yang harus dipenuhi, menyangkut ; (1) program yang jelas, (2) lokasi tempat program yang akan dilaksanakan, (3) sasaran yang jelas (RTS, kelompok, lingkungan/Br. Dinas, desa/kelurahan, dll, (4) volume atau target yang disasar (berapa RTS, kelompok, lingkungan/dusun, desa, dll, (5) jumlah anggaran yang dibutuhkan, dan (6) waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program.

Tujuan dilaksanakannya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan partisipatif adalah :

- Membangun persepsi yang sama dari seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- Mewujudkan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terukur, terinci, dan berkelanjutan agar lebih efektif dalam rangka percepatan

penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan peran serta masyarakat, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pelestarian hasil-hasilnya.

Sasaran yang ingin dicapai adalah (1) teraksesnya program-program penanggulangan kemiskinan oleh RTS/masyarakat secara optimal dan berkeadilan, (2) Terselenggaranya pengelolaan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu antara program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan (3) Tercapainya target pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran penerima manfaat, tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu.

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk memadukan program-program secara lintas sektor dan lintas hirarki pemerintahan, baik dalam proses perencanaan maupun dalam proses pelaksanaan. Perumusan rencana program/kegiatan merujuk pada potensi, kondisi, dan permasalahan di masing-masing lokasi yang dituangkan ke dalam dokumen rencana matrik program/kegiatan. Dokumen rencana tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program/kegiatan secara terkoordinasi dengan pelibatan masyarakat. Untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan program/kegiatan di lapangan, perlu dikawal dengan pola "pendampingan".

Adapun mekanisme pelaksanaan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan sebagai berikut :

- Inventarisasi program/kegiatan masing-masing OPD berdasarkan 3 (tiga) kelompok program penanggulangan kemiskinan yaitu (1) Kelompok Program Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial, (2) Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dan (3) Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
- Pemantapan program melalui koordinasi, pemantauan, dan verifikasi lapangan.
- Melakukan pembinaan dan pengendalian program/kegiatan secara periodik oleh masing-masing OPD/Lembaga terkait.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sekurang-kurangnya sebulan sekali serta dikoordinasikan melalui TKPKD Kota Denpasar.
- Melaporkan kemajuan hasil pelaksanaan program secara periodik sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali kepada Walikota.

- Koordinasi dan pelaksanaan program/kegiatan secara lebih rinci

4.10 Kepedulian Dunia Usaha (Corporate Social Responsibility) dan Program Bina Lingkungan

Dalam mewujudkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan, termasuk dunia usaha, LSM, dan lembaga lain yang mempunyai kepedulian terhadap kemiskinan di masyarakat.

Dunia usaha mempunyai tanggung jawab terhadap perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui penyisihan keuntungan yang disalurkan untuk kegiatan sosial dan bina lingkungan melalui kegiatan *corporate social responsibility* dan program pengembangan bina lingkungan. *corporate social responsibility* dan program pengembangan bina lingkungan bisa diakses oleh TKPKD Kota Denpasar dengan membentuk Forum Sosial Dunia Usaha untuk merencanakan program penanggulangan kemiskinan dengan sumber pendanaan dari dunia usaha. Dalam pelaksanaannya, data, lokasi dan sasaran ditentukan oleh TKPKD Kota Denpasar dan secara teknis program dilaksanakan oleh dunia usaha atau OPD teknis bila ada penyerahan dari dunia usaha.

4.11 Penanganan Covid-19 di Kota Denpasar

Kejadian luar biasa pada tahun 2020 membawa dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Adanya kejadian ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyiapkan instrumen kebijakan yang tepat dan juga mendorong masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Adapun kebijakan tersebut mencakup kebijakan dari pusat, provinsi Bali, pemerintah Kota Denpasar, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa maupun kelurahan. Kota Denpasar telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan covid sejak awal Maret 2020. Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB sebagai Percepatan Penanganan *Covid-19* meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja (*work from home*), pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan.

Pemberlakuan PSBB di Kota Denpasar juga diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Dalam peraturan tersebut berisi kebijakan mengenai kesehatan dan keselamatan masyarakat; jaring pengaman sosial (JPS) tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran; ekonomi (kegiatan usaha) dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan; penyiapan adaptasi kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan ketat; dan sinergitas pemerintah, desa adat, swasta dan masyarakat.

Pemerintah pusat maupun daerah mulai menerapkan kehidupan normal yang baru (*new normal*) dan melonggarkan PSBB. Untuk itu protokol masyarakat produktif dan aman *covid-19* menuju normal baru (*new normal*) menjadi penting diperhatikan oleh seluruh masyarakat. Dalam bidang kesehatan, penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) serta Gerakan Masyarakat (Germas) untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak serta pembatasan kegiatan masyarakat harus terus disosialisasikan melalui berbagai media. Perkembangan *covid-19* sampai dengan tanggal 26 September 2020 menunjukkan terdapat 2.297 penduduk Denpasar positif *covid-19*. Dari 2.297 penderita tersebut, 160 dalam perawatan, 44 meninggal, dan 2.093 dinyatakan sembuh (*sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, <https://covid19.denpasarkota.go.id>*).

Dalam situasi pandemi, Kota Denpasar sebagai salah satu destinasi wisata secara perlahan telah berupaya untuk menggerakkan kegiatan pariwisata. Pemerintah Kota Denpasar juga mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 443/044/Gugus Tugas *Covid-19*/2020 tentang Strategi Persiapan Menuju Masyarakat Tatanan Baru Produktif dan Aman *Covid-19* di Kota Denpasar. Sementara itu, fokus untuk pemulihan ekonomi diperlukan instrumen kebijakan penganggaran yang tepat dengan memperhatikan skala prioritas penanganan. Skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru dapat dilakukan melalui penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman *covid-19*. Oleh karena itu, lembaga pengawasan masyarakat didorong untuk mendampingi masyarakat dalam menerapkan aturan-aturan kejadian luar biasa tersebut. Lembaga pengawasan ini perlu diperkuat dengan aturan yang jelas, sehingga dapat berfungsi optimal. Meskipun demikian, dalam proses implementasi kebijakan tersebut masih ditemukan kendala belum optimalnya upaya peningkatan keamanan dan ketertiban

di Kota Denpasar. Hal ini sebabkan masih lemahnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah (perda) di Kota Denpasar yang mengindikasikan masih belum optimalnya pelayanan publik sebagai bentuk supremasi hukum. Penegakan perda harus didukung oleh komitmen pemerintah daerah yang kuat dan kerjasama lintas sektoral. Sementara itu, keamanan dan ketertiban Kota Denpasar dinilai belum optimal karena masih ditemukan kasus konflik sosial dalam masyarakat serta masih tingginya angka kriminalitas. Bersamaan dengan situasi kejadian luar biasa tersebut, peran lembaga keamanan tradisional seperti Pecalang dan Jaga Bhaya sangat penting dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kejadian luar biasa ini berpengaruh juga terhadap situasi keamanan dan ketertiban daerah yang akan mempengaruhi kegiatan masyarakat pada umumnya dan kegiatan pariwisata pada khususnya.

Melalui Dinas Sosial Pemkot Denpasar juga telah memberi bantuan penanggulangan dampak covid 19 kepada 10.372 Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga sebanyak 44.379 orang.(DTKS Dinas Sosial Pemkot Denpasar) sebagaimana terlihat di tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Bantuan Penanggulangan Dampak Covid-19 dengan Pendanaan dari APBD

NO	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat	Besaran	Jangka Waktu	Total Anggaran
1	Bantuan Sembako	13,570	Rp.250.000	1 bulan	Rp3,392,500,000
2	Bantuan Langsung Tunai Sektor Formal	9,289	Rp.600.000	1 bulan	Rp5,573,400,000
3	Bantuan Langsung Tunai Sektor Informal	18,206	Rp.600,000	2 bulan	Rp21,847,200,000

Sumber: Diringkas dari Bantuan Penanggulangan Dampak Covid-19 Dinas Sosial Kota Denpasar

Disamping bantuan penanggulangan dampak covid-19 yang bersumber dari dana APBD juga diberikan bantuan yang bersumber dari APBN, antara lain :

1. Bantuan melalui Program Keluarga Harapan terhadap keluarga penerima manfaat sebanyak 1.903 dengan besaran Rp1,493,400,000 untuk 12 bulan sehingga menghabiskan total anggaran sebesar Rp1,493,400,000.
2. Bantuan Pangan Non Tunai / Program Sembako terhadap 2.646 keluarga penerima manfaat dengan besaran Rp.200.000 selama 12 bulan sehingga menghabiskan total anggaran sebesar Rp.529,200,000.

3. Bantuan Sosial Tunai diberikan terhadap 11,287 keluarga penerima manfaat dengan besaran Rp.600.000 selama 1 bulan dengan total anggaran sebanyak Rp.6,772,200,000

Selain itu juga turut dirancang Strategi Perlindungan Sosial dengan melibatkan beberapa OPD terkait. Seperti Dinas Ketenagakerjaan dengan program Bursa Kerja, Kartu Pra Kerja, Wirausaha Muda Denpasar, Pelatihan dan Sertifikasi Profesi, dan Pelatihan Online. Program lainnya juga diterapkan bantuan Sosial sebesar Rp 150 ribu/hari bagi masyarakat kurang mampu yang terjangkit Covid-19. Selain itu, perlindungan Anak dengan keringanan SPP serta kebijakan tanpa Drop Out (DO), Pengendalian Inflasi, Keringanan Kredit, serta menjaga Daya Beli dan stabilitas perekonomian. Serangkaian upaya ini merupakan komitmen besar pimpinan daerah/ Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Denpasar guna menjamin kebutuhan dasar masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat pandemi covid19 tersebut.

Selama masa pandemi covid-19 ini Pemkot Denpasar mempersiapkan beragam langkah untuk menghadapi kemungkinan terburuk selama penanganan Virus Corona (Covid-19). Diantaranya adalah merancang penerapan Lumbung Pangan. Lumbung Pangan ini merupakan wujud sinergitas beberapa OPD Pemkot Denpasar untuk ikut langsung dalam menciptakan ketersediaan pangan yang mumpuni bagi masyarakat terdampak yang kurang mampu. Dimana OPD terkait memiliki tugas masing-masing untuk mendukung ketersediaan pangan sampai pada distribusinya sehingga sampai kepada masyarakat Kota Denpasar yang terdampak. Dalam konsep lumbung pangan tersebut, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang bertugas menjaga stabilitas dan alternatif pangan, Dinas Perhubungan memastikan kelancaran distribusi dan jalur distribusi, Dinas Pertanian memacu peningkatan produksi pertanian lokal, Satuan Polisi Pamong Praja, Kesbangpol memastikan keamanan dan ketertiban selama proses distribusi serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selanjutnya Bagian Kerjasama menggalang Kemitraan dan Tanggung Jawab Sosial (CSR) dengan pihak perusahaan swasta, Dinas Perindag mengawal perekonomian dan pangan, Dinas Sosial dan DMPD melaksanakan validasi data, merancang kebutuhan anggaran, dan Kecamatan serta Pemerintah Desa/Lurah memvalidasi data masyarakat terdampak dan mendistribusikan bantuan. Kebijakan Daerah dibidang ketahanan pangan ini telah dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/791/HK/2020 Tentang Pembentukan satuan Tugas Ketahanan Pangan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Keputusan

Walikota ini dikeluarkan atas pertimbangan untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 bahan pangan di daerah serta agar langkah kebijakan mengatasi dampak pandemi covid-19 dapat dijalankan secara tepat, terpadu dan sinergis.

4.12. Target Penanggulangan Penduduk Miskin

Memperhatikan persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 2,10% mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 2,14%. Peningkatan persentase kemiskinan disebabkan beberapa faktor. Salah satu faktor utama yaitu wabah pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh Negara di dunia. Sektor-sektor perekonomian mengalami penurunan drastis. Terlebih pemerintah yang belum siap dalam mengalami pandemi yang datang secara tiba-tiba.

Sebagai upaya untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar menggunakan beberapa pertimbangan dan trend penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Bali. Dalam pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) Pemerintah Provinsi Bali menggunakan target moderat yaitu penurunan sekitar 0,6% setiap tahunnya dengan menggunakan berbagai pertimbangan. Disisi lain perlu diperhitungkan bahwa penurunan persentase penduduk miskin pada kisaran angka 2% memerlukan kerja keras dan harus dilakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kondisi yang ada.

Melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Denpasar, juga menggunakan target penurunan secara moderat untuk penurunan persentase penduduk miskin. Dengan menggunakan acuan 2,12% pada tahun 2021, maka target penurunan persentase penduduk miskin sampai tahun 2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin
di Kota Denpasar Tahun 2021-2026

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target	2.14%	2,12%	2.034%	2.012%	1.99%	1.968%	1.946%

BAB V

LOKASI PRIORITAS

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang perlu mendapatkan intervensi pada tataran nasional dan juga tataran daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota yang lebih spesifik. Artinya, kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun saat ini tidak lagi bersifat seragam namun perlu memperhatikan kondisi setiap dimensi penyebab kemiskinan suatu wilayah. Dengan sumber daya yang terbatas, penyelesaian dimensi kemiskinan perlu berfokus dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat

Kota Denpasar sebagai kota yang multifungsi, menghadapi banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Denpasar mencakup banyak aspek. Untuk itu diperlukan skala prioritas untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi, dimulai dengan mengidentifikasikannya secara rinci sesuai perkembangan riil yang terjadi. Permasalahan penanggulangan kemiskinan yang berkembang di Kota Denpasar, dikelompokkan berdasarkan 6 Dimensi antara lain Dimensi Pertumbuhan Ekonomi, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketenaga Kerjaan, Dimensi Kesehatan, Dimensi Infrastruktur serta Dimensi Belanja Daerah. Ke 6 dimensi tersebut diposisikan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan yang bermakna pada area persoalan itulah perlu dilakukan intervensi kebijakan. Dimensi dimensi persoalan kemiskinan kota Denpasar ini didasarkan atas kajian determinan kemiskinan daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III didepan.

5.1. Dimensi Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah laju pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi yang dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi/muncul di suatu daerah pada periode tertentu.

Sebagaimana terlihat dalam Bab III didepan, PDRB per Kapita Kota Denpasar hingga 2019 mengalami peningkatan. PDRB per kapita merupakan gambaran nilai

tambah yang bisa diciptakan oleh masing - masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Tren peningkatan PDRB dan PDRB per Kapita di Kota Denpasar terancam terputus di tahun 2020 ini akibat dampak pandemi covid19 yang sedang terjadi. Pandemi COVID-19 menuntut banyaknya penyesuaian sosial yang berakibat pada turunnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Disamping adanya pandemi covid19, persoalan lain yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan PDRB perkapita Kota Denpasar antara lain:

- a. Jumlah penduduk Denpasar yang terus bertambah seiring dengan tingginya arus pendatang. Daya tarik Kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi mendorong penduduk daerah lain untuk tinggal di Denpasar baik untuk mencari pekerjaan maupun untuk keperluan lain seperti halnya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tingginya pertambahan penduduk tanpa diikuti dengan peningkatan PDRB yang sepadan akan menyebabkan turunnya PDRB per kapita.
- b. Daya saing ekonomi yang cukup tinggi serta kedatangan para pendatang yang sering kali tidak disertai dengan keahlian yang cukup justru membawa pada permasalahan baru bagi perekonomian Denpasar. Oleh karena itu, meskipun dengan sumbangan PDRB sebesar 18,86 % dari total PDRB Provinsi Bali, jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadikan tugas khusus bagi Denpasar untuk terus meningkatkan atau bahkan mempertahankan PDRB perkapitanya.

Isu pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan masalah kepadatan penduduk yang pada gilirannya berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan. Namun terjadinya bonus demografi dibalik kepadatan penduduk Kota Denpasar diharapkan dapat mengurangi persoalan kepadatan penduduk tersebut. Salah satu karakteristik penduduk Bali sebagai daerah tujuan migran adalah persebaran antar kabupaten/kota yang tidak merata. Menurut data BPS Provinsi Bali, pada tahun 2010 penduduk Bali tinggal di Kota Denpasar mencapai 20,29 persen dan diproyeksikan pada tahun 2020 penduduk Bali yang tinggal di Kota Denpasar mencapai 21,98 persen, padahal luas Kota Denpasar hanya sekitar 2,27 persen dari wilayah Bali. Sementara itu kabupaten lainnya di Bali menguasai wilayah yang jauh di atas Kota Denpasar. Dengan luas Kota Denpasar yang relatif sempit dan menampung distribusi penduduk paling besar, maka jelas tercermin kepadatan Kota Denpasar yang mencolok tinggi yaitu terdapat sekitar 6 (enam) ribu orang per km² pada tahun 2010 dan diproyeksikan mencapai 7 (tujuh) ribu orang per km² pada tahun 2020.

Berdasarkan struktur umur dan kemampuan berproduksi, secara ekonomi penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penduduk kelompok usia produktif (penduduk yang berumur 15 hingga 64 tahun) dan penduduk kelompok usia nonproduktif (penduduk yang berumur 0 hingga 14 tahun dan penduduk berumur 65 tahun keatas). Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia nonproduktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Dengan demikian rasio ketergantungan dapat menggambarkan banyaknya penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan secara kasar dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong maju atau sedang berkembang. Suatu wilayah dikatakan mengalami bonus demografi apabila angka rasio ketergantungannya telah mencapai 50 persen ke bawah. Atau dengan kata lain bahwa satu orang usia nonproduktif ditanggung oleh minimal 2 orang dari mereka yang produktif. Rendahnya angka ketergantungan yang dimiliki Kota Denpasar (dibawah 50%) merupakan bonus demografi. Terjadinya bonus demografi sebagai dampak perubahan struktur umur penduduk antara lain tersedianya suplai tenaga kerja yang besar dan adanya peran perempuan memasuki pasar kerja. Hal ini akan menjadi sangat menguntungkan secara ekonomi apabila modal manusia yang besar tersebut mendapat kesempatan kerja yang produktif dalam peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan tabungan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan investasi. Bonus demografi dikatakan sebagai sebuah kesempatan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dalam menuju kesempatan emas “the windows of opportunity” ketika rasio ketergantungan berada pada tingkat terendah.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk menurut kabupaten/kota 2010- 2020, angka rasio ketergantungan penduduk pada tahun 2010- 2020 yang paling rendah terdapat di Kota Denpasar sebesar 39,31% (2010), 37,49% (2015), dan 35,56% (2020). Angka rasio ketergantungan penduduk Kota Denpasar tahun 2020 yang sebesar 35,56 persen mengandung arti bahwa pada setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kota Denpasar menanggung sebanyak 36 orang penduduk usia non produktif.

5.2. Dimensi Tingkat Pendidikan

Pada Dimensi yang kedua, yakni tingkat pendidikan dapat dilihat dari Rata-rata lama sekolah (RLS) serta Tingkat Partisipasi Sekolah (APK dan APM). Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) adalah lamanya tahun belajar yang diselesaikan

dalam pendidikan formal dan tidak termasuk tahun yang mengulang. Rata-rata lama sekolah di Kota Denpasar tiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Setelah tahun 2014 rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan hingga mencapai 11,16 persen pada tahun 2018. Akan tetapi masih terdapat perbedaan Rata- Rata Lama Sekolah menurut Gender dimana yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki untuk menimba ilmu.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Pada masing-masing jenjang pendidikan di kota Denpasar, masih memperlihatkan semakin tinggi jenjang pendidikan maka besaran APM semakin rendah juga masih terjadi. Angka Partisipasi Murni (APM), merupakan beberapa indikator pendidikan yang menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK dapat digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Data APK Denpasar menunjukkan bahwa serapan pendidikan di tingkat SD adalah yang tertinggi. Akan tetapi, semakin tinggi jenjang pendidikannya terjadi pengurangan presentase serapan. Tingkat serapan terendah dapat dilihat di jenjang Perguruan Tinggi. Hal ini menandakan bahwa bagi sebagian besar penduduk, pendidikan di jenjang perguruan tinggi masih merupakan suatu kemewahan.

Tingkat pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Dipihak lain, kemiskinan identik dengan ketidakmampuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi terutama karena faktor pembiayaan. Berdasarkan data tahun 2019, diperkirakan bahwa 14.49% penduduk miskin di Kota Denpasar tidak menamatkan pendidikan tingkat SD., sebanyak 59.48% penduduk miskin hanya menamatkan pendidikan setingkat SD dan SMP. Sedangkan presentase jumlah penduduk miskin yang menamatkan pendidikan SMA atau lebih hanya mencapai 26.02%.

5.3. Dimensi Ketenagakerjaan.

Data ketenagakerjaan Denpasar menunjukkan jumlah tenaga kerja aktif dari tahun ke tahun cukup berfluktuasi. Bahkan untuk tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki cenderung mengalami penurunan dari 84.43% di tahun 2015 menjadi 83.18% di tahun 2018. Dengan demikian sebesar 83.18% penduduk laki-laki tergolong sebagai angkatan kerja, sedangkan sisanya bisa digolongkan sebagai penduduk bukan angkatan kerja. Sedangkan untuk penduduk perempuan persentase sempat meningkat di tahun 2017 dimana angkatan kerja mencapai 64.22%, namun mengalami penurunan di tahun 2018 dengan 63.92%. Jika dibandingkan, jumlah angkatan kerja laki-laki memang lebih tinggi dibandingkan angkatan kerja perempuan. Hal ini disebabkan adanya perempuan yang sudah termasuk usia produktif tetapi memilih untuk mengurus rumah tangga dan tidak berpartisipasi sebagai angkatan kerja.

Secara empiris tidak semua penduduk yang ada dalam usia kerja dapat terserap. Keadaan ini terkait dengan konsep Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja, namun tidak mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Angka TPT Denpasar selama kurun waktu tahun 2015-2018 cenderung menurun. TPT Denpasar pada tahun 2015 sebesar 3,54 persen, kemudian turun menjadi 2,63 persen pada tahun 2017. Selanjutnya menurun kembali menjadi sebesar 1,82 persen pada tahun 2018.

Merebaknya wabah COVID-19 sejak awal bulan Maret 2020, memberikan dampak pada berbagai sektor terutama ekonomi yang menyangkut ketenagakerjaan. Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terkena PHK, tentunya berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. Pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan. Seseorang yang menganggur tidak mendapatkan penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya sehari-hari, dan membuatnya menjadi kelompok yang rentan miskin sehingga angka kemiskinan akan meningkat mengikuti tingkat pengangguran yang juga meningkat (Buletin TNP2K, 2020)

Sementara jika ditinjau menurut status pekerjaan, secara umum pilihan masyarakat untuk menjadi buruh/karyawan masih memiliki persentase tertinggi, yaitu sekitar 66-68 persen selama kurun waktu tahun 2017-2018. Pilihan kedua yang terbanyak adalah berusaha sendiri, yang persentasenya berkisar antara 10-13 persen dalam periode empat tahun terakhir.

5.4. Dimensi Kesehatan Masyarakat.

Tingkat kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan mutu pembangunan suatu wilayah. SDM yang sehat akan mampu secara maksimal mendukung proses dan dinamika pembangunan suatu wilayah, khususnya pembangunan ekonominya. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai Angka Harapan Hidup (AHH) maka produktivitas akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Artinya semakin tinggi angka harapan hidup maka tingkat kemiskinan akan menurun..

Angka Harapan Hidup Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2019, AHH Kota Denpasar mencapai 74.68 tahun. AHH Kota Denpasar merupakan yang tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Badung (74.99 tahun). Angka ini lebih tinggi dari rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Bali yang hanya mencapai 71.99 tahun. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan menjadi hal yang wajib dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Tersedianya fasilitas kesehatan menjadi kunci penyampaian pelayanan kesehatan yang prima sehingga berdampak positif bagi peningkatan tingkat kesehatan masyarakat. Meskipun demikian persentase jumlah penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan berobat jalan masih berkisar 50 persen. Pada tahun 2017 persentasenya mencapai 51,15 persen, kemudian meningkat menjadi 51,53 persen di tahun 2018. Kecenderungan untuk berobat jalan tidak terlepas dari akses terhadap berbagai fasilitas kesehatan termasuk ketersediaan jaminan kesehatan yang belakangan makin ditingkatkan seperti JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara) maupun JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Di tahun 2018, penduduk yang berobat jalan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan ini mencapai 39,72 persen. Capaian ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 57,96 persen.

5.5. Dimensi Infrastruktur dan Fasilitas Perumahan

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat keefisienan dan keefektifan kegiatan ekonomi serta merupakan prasyarat agar berputarnya roda perekonomian berjalan dengan baik. Bahkan salah satu hal yang menyebabkan keteringgalan suatu daerah dalam membangun ekonominya adalah rendahnya daya tarik suatu daerah dan sumber daya yang dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur, sehingga

menyebabkan tingkat aktivitas ekonomi yang rendah. Salah satu aspek penting adalah infrastruktur fasilitas perumahan seperti listrik, air minum, sanitasi, dan penggunaan bahan bakar.

Berdasarkan hasil Susenas 2018, hanya 38,5% rumah tangga yang bangunan tempat tinggalnya berstatus milik sendiri. Sementara jumlah rumah tangga yang menempati luas lantai per kapita <10m² turun menjadi sebesar 35,48%. Selain itu, beberapa indikator rumah layak seperti lantai bukan tanah, atap yang layak, dinding yang permanen, dan sumber penerangan listrik menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Denpasar sudah memiliki kualitas perumahan yang cukup baik. Ditinjau dari beberapa aspek kualitas perumahan, terjadi penurunan kualitas pada lantai bukan tanah, dinding permanen, dan penerangan listrik masing-masing sebesar 0,92 poin, 1,66 poin, dan 0,23 poin. Sementara kondisi atap layak mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,08 poin. Secara rata-rata terlihat tidak terjadi peningkatan kualitas yang signifikan terhadap kondisi perumahan di Kota Denpasar pada tahun 2018. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan harga bahan bangunan yang tidak mampu dibeli oleh penduduk ekonomi bawah. Sementara jika mencermati rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum bersih dan layak, tercatat bahwa sebagian besar rumah tangga sudah mempunyai akses terhadap air minum bersih dan layak, keduanya masing-masing sebesar 98,55%

5.6. Dimensi Belanja Daerah

Aspek Belanja Daerah terkait erat dengan kemampuan daerah untuk menyediakan anggaran terutama yang bersumber dari APBD untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan. Alokasi APBD untuk mendanai kebijakan penanggulangan kemiskinan mencerminkan prioritas dan komitmen daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kedepan. Intervensi pada rencana alokasi APBD terkait erat dengan penajaman rencana kebijakan dan program aksi untuk penanggulangan kemiskinan.

Tabel 5.1

Jenis Persoalan dan Wilayah Intervensi per Dimensi

NOMOR	DIMENSI	PERSOALAN
1	Pertumbuhan Ekonomi	Kecenderungan menurunnya kegiatan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi covid19
2	Tingkat Pendidikan	Ketimpangan RLS menurut Gender
		Ketimpangan Angka Partisipasi Murni
		Masalah APK (Ketimpangan dalam prosentase serapan berdasarkan jenjang pendidikan)
3	Ketenaga-kerjaan	Mempertahankan angka TPT dimasa pandemic
4	Kesehatan Masyarakat	Meski AHH tinggi, prosentase masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan untuk memanfaatkan sarana dan fasilitas kesehatan masih di kisaran 50%
5	Infrastruktur dan Fasilitas Perumahan	akses terhadap air minum bersih, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada tahun 2018 mencapai 98,55 persen, turun jika dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 99,81 persen.
6	Belanja Daerah	hanya 6 OPD memiliki program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan

VI

PENUTUP

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan. Upaya ini tidak hanya melibatkan pihak pemerintah (K/L dan Pemerintah Daerah), tetapi juga pihak non-pemerintah (organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional). Oleh sebab itu, efektivitas penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan tersebut dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya

RPKD ini diharapkan dapat semakin mempertegas komitmen dan sinergi Pemerintah Kota Denpasar bersama para pemangku kepentingan dalam memecahkan isu dan masalah-masalah kemiskinan. RPKD ini juga diharapkan dapat meningkatkan dan menyelaraskan berbagai upaya untuk membangun kosepahaman bersama antar berbagai pemangku kepentingan yang bersifat lintas sektoral untuk mengatasi masalah kemiskinan

Dengan mencermati substansi RPKD ini dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan penting mendapat perhatian disamping untuk penguatan kelembagaan juga untuk efektifitas program
2. Pelibatan atau partisipasi publik dalam pengelolaan masalah kemiskinan harus diupayakan untuk mewujudkan good governance dalam setiap pengelolaan program pembangunan
3. Upaya penanggulangan kemiskinan adalah persoalan bersama sehingga sudah seyogyanya melibatkan banyak pihak namun sangat bergantung dari *political will* pemerintah sebagai pengemban program pembangunan. Sebab itu diperlukan komitmen kuat dari pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan